



**2020**

**LAPORAN KINERJA  
PUSAT PENELITIAN**



**BADAN KEAHLIAN**  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
[HTTPS://PUSLIT.DPR.GO.ID/](https://puslit.dpr.go.id/)

# KATA PENGANTAR

---

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penelitian (Puslit) tahun 2020. LKj ini disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai alat penilaian kinerja, LKj Puslit ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Puslit dalam memberikan pelayanan serta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan ini juga merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Puslit. Analisis dan evaluasi objektif dalam laporan kinerja Puslit diharapkan dapat mendorong terwujudnya optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja para pejabat dan pegawai di lingkungan Puslit di masa yang akan datang.

LKj tahun 2020 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Puslit berdasarkan Indikator Kinerja dan targetnya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020. Capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan Puslit tahun 2020 masing-masing mencapai 100%. Meskipun pada tahun ini anggaran Puslit mengalami pemotongan yang cukup signifikan akan tetapi capaian kinerja tetap dapat dipertahankan. Hal ini tidak mudah, mengingat adanya pandemi

*Coronavirus Disease (Covid-19)* yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 yang tentunya ikut memengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Puslit. Capaian ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan segenap pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan Puslit pada tahun 2020.

Kami berharap melalui LKj ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang rinci, jelas, dan transparan mengenai capaian kinerja Puslit dengan segala potensi, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun ini. Selain itu, kami juga berharap LKj ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyusunan, perumusan kebijakan, dan rencana kerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

**Kepala Pusat Penelitian**

**Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si**

NIP: 19711117 199803 1 004

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

---

Amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya yang terakhir, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dibentuk sebagai bagian dari pengembangan sistem pendukung bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal tersebut direalisasikan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka dibentuk Pusat Penelitian (Puslit) yang merupakan Unit Kerja Eselon II dan berada di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Tugas Puslit adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Puslit dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu sebanyak 85 orang peneliti dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sesuai amanat dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 maka setiap unit Eselon II perlu

menyusun suatu perencanaan tahunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Puslit yang menjadi kontrak kerja Puslit terhadap Badan Keahlian DPR RI tahun 2020.

**Tabel 1. Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , Prosiding Seminar yang dipublikasikan	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen administrasi Puslit	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Jumlah	-	-	100%

Sumber: Pusat Penelitian, 2020.

Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang terjadi tentunya membawa tantangan tersendiri bagi organisasi untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang telah dikontrakkan di awal tahun 2020. Namun atas komitmen dan kerja sama seluruh individu di Puslit dan didukung oleh kerja sama antarunit organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI maka Puslit mampu merealisasikan seluruh perjanjian kinerja yang telah dikontrakkan.

Indikator kinerja yang *pertama*, yaitu hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, Prosiding Seminar yang dipublikasikan oleh Puslit di targetkan sebesar 100%. Perjanjian kerja yang dikontrakkan adalah sebanyak 132 dokumen yang merupakan produk dari Puslit, dan seluruhnya berhasil direalisasikan di tahun 2020. Indikator yang *kedua*, yaitu jumlah dokumen administrasi Puslit.

Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen, seluruhnya berhasil direalisasikan. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja Puslit tahun 2020 tercapai 100%.

Seluruh kegiatan atau program yang dilakukan di Puslit didukung oleh anggaran yang cukup memadai meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran akibat adanya realokasi dan *refocusing* anggaran untuk kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19. Anggaran yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja Puslit sepanjang periode tahun 2020 adalah sebesar Rp10.820.521.000. Puslit mampu mencapai kinerjanya yang tinggi dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10.552.139.885 (97,52% dari total anggaran). Berdasarkan hal tersebut, Puslit telah melakukan penghematan anggaran senilai Rp268.381.115. Target dan realisasi anggaran Puslit lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Anggaran Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020**

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>10.820.521.000</b>	10.552.139.885	97,52

Sumber: Pusat Penelitian, 2020.

Selain itu, berdasarkan hasil survei Tingkat Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen Tahun 2020, Puslit memperoleh indeks kepuasan dengan Nilai Interval 3,21 atau Nilai Interval Konversi 80,249 dengan kategori Baik. Artinya tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah diberikan Puslit selama tahun 2020 dinilai baik

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERMASALAHAN.....</b>	<b>7</b>
1. REGULASI.....	7
2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
3. SARANA DAN PRASARANA.....	9
4. MEKANISME KERJA DENGAN UNIT KERJA LAIN.....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS.....</b>	<b>11</b>
1. VISI.....	11
2. MISI.....	12
3. TUJUAN.....	12
4. SASARAN.....	13
<b>B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III. PENGUKURAN KINERJA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. PENGUKURAN KINERJA PUSAT PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>

<b>B.</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
1.	PENELITIAN.....	20
2.	JURNAL ILMIAH.....	22
3.	BUKU.....	32
4.	INFO SINGKAT.....	34
5.	PARLIAMENTARY REVIEW.....	37
6.	PROSIDING SEMINAR.....	38
7.	SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN.....	40
8.	WEBSITE PUSAT PENELITIAN.....	44
9.	WORKSHOP, DISKUSI INTERNAL, DAN SEMINAR NASIONAL.....	49
10.	QUICK WINS.....	51
<b>C.</b>	<b>AKUNTABILITAS KEUANGAN.....</b>	<b>55</b>
	<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
	LAMPIRAN.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Pusat Penelitian Tahun 2020.....	3
Tabel 2.	Pembidangan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020.....	3
Tabel 3.	Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020.....	4
Tabel 4.	Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020 .....	5
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020.....	14
Tabel 6.	Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian Tahun 2020.....	17
Tabel 7.	Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Pusat Penelitian Tahun 2020.....	18
Tabel 8.	Rekapitulasi Produk Pusat Penelitian Tahun 2020.....	19
Tabel 9.	Hasil Survei Berdasarkan Fraksi.....	42
Tabel 10.	Hasil Survei Berdasarkan Periode Responden Menjadi Anggota DPR RI.....	43
Tabel 11.	Karakteristik Pengunjung Website Pusat Penelitian Berdasarkan Lokasi dan Penggunaan <i>Operating System</i> .....	48
Tabel 12.	Anggaran Pusat Penelitian Tahun 2020.....	55
Tabel 13.	Anggaran Indikator Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, Parliamentary Review, Prosiding Seminar yang Dipublikasikan Tahun 2020.....	58
Tabel 14.	Anggaran Dokumen Administrasi Pusat Penelitian Tahun 2020.....	59
Tabel 15.	Realisasi Kegiatan dan Anggaran Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2020.....	61
Tabel 16.	Realisasi Anggaran Anggaran Pusat Penelitian	

Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020..... 62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pembidangan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020.....	4
Gambar 2.	Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020.....	5
Gambar 3.	Jenjang Kepangkatan Peneliti di Pusat Penelitian Tahun 2020.....	6
Gambar 4.	Struktur Organisasi Pusat Penelitian.....	6
Gambar 5.	Revisi Anggaran Puslit Tahun 2020.....	14
Gambar 6.	Target dan Realisasi Kinerja Pusat Penelitian Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian berupa Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , Prosiding Seminar Tahun 2020.....	17
Gambar 7.	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian berupa Jumlah Dokumen Administrasi Pusat Penelitian Tahun 2020.....	18
Gambar 8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	22
Gambar 9.	Alur Pengelolaan Naskah pada Jurnal.....	23
Gambar 10.	Jurnal Negara Hukum.....	24
Gambar 11.	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.....	26
Gambar 12.	Jurnal Aspirasi.....	28
Gambar 13.	Jurnal Politica.....	30
Gambar 14.	Jurnal Kajian.....	31
Gambar 15.	Buku-Buku Hasil Penelitian.....	33
Gambar 16.	Alur Penerbitan Info Singkat.....	35
Gambar 17.	Info Singkat.....	36
Gambar 18.	<i>Parliamentary Review</i> .....	37
Gambar 19.	Prosiding Seminar.....	39
Gambar 20.	Tugas Tim Pengelola <i>Website</i> Pusat Penelitian.....	45
Gambar 21.	Perbedaan Tampilan <i>Website</i> Pusat Penelitian.....	46
Gambar 22.	<i>Overview</i> dari Pengunjung <i>Website</i> Pusat Penelitian	47

Gambar 23.	Kegiatan <i>Webinar</i> Pusat Penelitian yang Bekerja Sama dengan Berbagai Kalangan.....	51
Gambar 24.	Aliran Pengelolaan Naskah pada Isu Sepekan.....	52
Gambar 25.	Isu Sepekan dan <i>Feed Back</i> dari Pimpinan DRP RI	53
Gambar 26.	Realisasi Anggaran Pusat Penelitian Tahun 2020...	56
Gambar 27.	Perbandingan Anggaran, Realisasi, dan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.....	57
Gambar 28.	Komposisi Anggaran Kegiatan Pusat Penelitian Tahun 2020.....	60

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>No.</b>	<b>Singkatan</b>	<b>Penjelasan</b>
1.	AKD	Alat Kelengkapan Dewan
2.	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
3.	DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4.	FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
5.	IKAPI	Ikatan Penerbit Indonesia
6.	IKU	Indikator Kinerja Utama
7.	KTI	Karya Tulis Ilmiah
8.	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9.	OJS	<i>Open Journal System</i>
10.	P3DI	Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi
11.	Puslit	Pusat Penelitian
12.	Renstra	Rencana Strategis
13.	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
14.	RKT	Rencana Kinerja Tahunan
15.	RUU	Rancangan Undang-Undang
16.	SDM	Sumber Daya Manusia
17.	Setjen	Sekretariat Jenderal
18.	SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
19.	TKP	Tim Koordinasi Penelitian

## **A. Gambaran Umum Organisasi**

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pengembangan sistem tersebut dilakukan melalui pembentukan Badan Keahlian DPR RI. Pasal 413 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI yang diatur dengan Peraturan Presiden. Dengan pembentukan Badan Keahlian DPR RI, dukungan keahlian terhadap DPR RI dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan optimal.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan untuk memenuhi amanat UU No. 17 Tahun 2014, membentuk Badan Keahlian DPR RI. Peraturan Presiden tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan lembaga legislatif.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015, diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR RI. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 ini telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dan terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Badan Keahlian terdiri atas (1) Pusat Penelitian, (2) Pusat Perancangan Undang-Undang, (3) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, (4) Pusat Kajian Anggaran, (5) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, (6) Kelompok Jabatan Fungsional, dan (7) Bagian Tata Usaha Badan Keahlian.

Selanjutnya diatur bahwa Pusat Penelitian (Puslit) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslit menyelenggarakan fungsi (a) perumusan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Puslit, (b) perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puslit, (c) perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puslit, (d) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Puslit, (e) penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian, (f) pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian, (g) pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian, (h) pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian, (i) pelaksanaan tata usaha Puslit, (j) penyusunan laporan kinerja Puslit, dan (k) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ke Kepala Badan Keahlian.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) di Puslit yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional (peneliti) dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha. Komposisi SDM Puslit secara lebih rinci tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Komposisi Sumber Daya Manusia Pusat Penelitian Tahun 2020



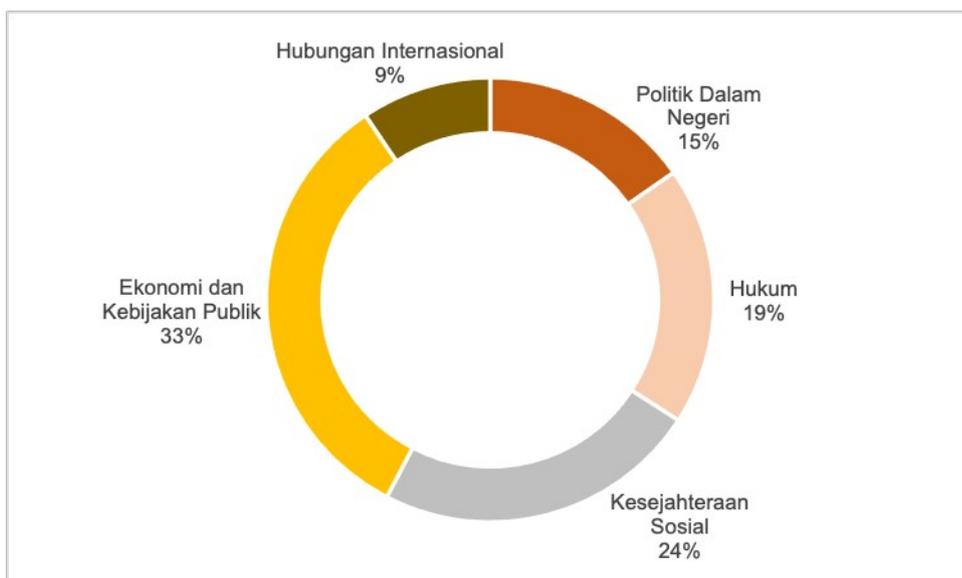
Sumber: Puslit, 2020.

Selanjutnya, kelompok jabatan fungsional peneliti yang berjumlah 85 orang tersebut dikelompokkan ke dalam lima bidang seperti pada Tabel 2 dan Gambar 1.

**Tabel 2.** Pembidangan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020



Sumber: Puslit, 2020.



Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 1.** Pembidangan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak ada penambahan SDM peneliti. Terakhir penambahan SDM terjadi di tahun 2019, di mana Puslit memperoleh 9 orang sebagai calon peneliti, masing-masing 4 orang di bidang politik dalam negeri, 2 orang di bidang ekonomi dan kebijakan publik, 2 orang bidang hukum, dan 1 orang bidang hubungan internasional. Kesembilannya telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 1 April 2020.

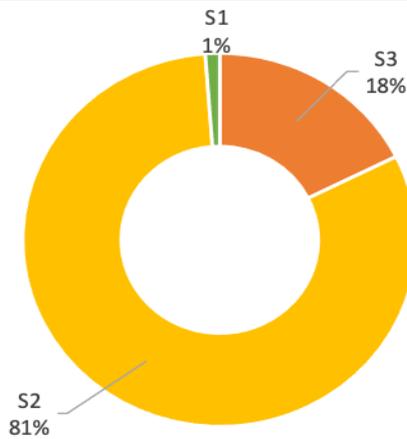
**Tabel 3.** Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	S3	15	17,65
2.	S2*)	69	81,18
3.	S1	1	1,18
	<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Puslit, 2020.

Keterangan \*): 5 orang sedang menyelesaikan S3 di beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Dilihat dari aspek kualitas, sebagian besar peneliti berpendidikan Strata 2 (S2). Hingga saat ini terdapat 15 orang yang bergelar doktor (S3) dan terdapat 1 orang berpendidikan Strata 1 (S1). Tingkat pendidikan para peneliti Puslit dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2.



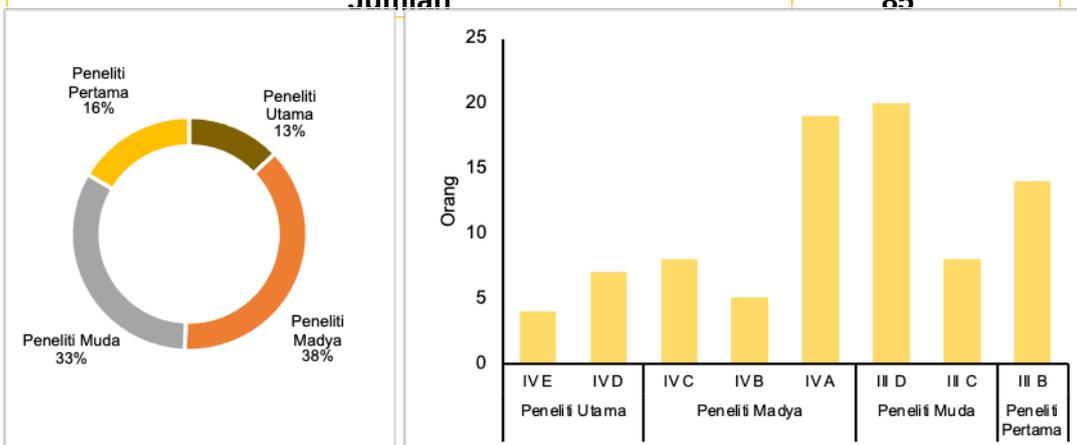
Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 2.** Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020

Sebagaimana kelompok jabatan fungsional lain, peneliti juga memiliki jenjang kepangkatan tertentu sesuai ketentuan berlaku. Puslit memiliki 11 orang Peneliti Utama (tiga di antaranya Profesor Riset), 32 orang Peneliti Madya, 28 orang Peneliti Muda, dan 14 orang Peneliti Pertama (Tabel 4).

**Tabel 4.** Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020

No.	Jabatan Peneliti	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Peneliti Utama	IV E	4
		IV D	7
2.	Peneliti Madya	IV C	8
		IV B	5
		IV A	19
3.	Peneliti Muda	III D	20
		III C	8
4.	Peneliti Pertama	III B	14
<b>Jumlah</b>			<b>85</b>



Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 3.** Jenjang Kepangkatan Peneliti di Pusat Penelitian Tahun 2020

Selanjutnya, secara kelembagaan Puslit memiliki struktur sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 seperti digambarkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Struktur Organisasi Pusat Penelitian

## B. Permasalahan

### 1. Regulasi

Dari aspek regulasi, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akan tetapi

UU tersebut tidak mengatur mengenai keberadaan peneliti dalam parlemen yang memiliki kekhasan tersendiri. Di sisi lain, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), termasuk di dalamnya Puslit dengan seluruh penelitiannya.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti, karena di satu pihak peneliti harus memenuhi ketentuan sebagai pejabat fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk berbagai peraturan teknis yang ditetapkan oleh LIPI sebagai instansi pembina, namun di lain pihak peneliti tetap harus melaksanakan tugasnya untuk memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI. Dengan demikian, keberadaan dan posisi peneliti di DPR RI perlu dasar hukum yang lebih tegas, sesuai dengan tugas-tugas yang diembannya.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Secara historis, keberadaan peneliti di Puslit telah dirintis sejak tahun 1990. Pada saat itu peneliti dikelompokkan ke dalam sebuah unit kerja, yaitu Bidang Pengkajian dan Analisis dan berada di bawah koordinasi Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I). Seiring dengan terjadinya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, P3I beberapa kali berganti nama (nomenklatur), yaitu Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi pada tahun 1995; sejak tahun 2005, menjadi Bidang Pengkajian yang berada di bawah Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI), dan saat ini menjadi Pusat Penelitian (Puslit).

Meskipun nama mengalami pergantian beberapa kali, lebih dari dua dasa warsa ternyata penambahan jumlah peneliti sangat lambat karena

adanya kebijakan *zero growth* dalam penerimaan pegawai. Pada awalnya jumlah peneliti sebanyak 16 orang. Jumlah ini berturut-turut meningkat menjadi 60 orang (tahun 2009) dan 81 orang (tahun 2013). Akan tetapi pada tahun 2014 jumlah ini berkurang lagi menjadi 77 orang karena ada 1 orang peneliti yang mengajukan pensiun dini, 1 orang peneliti yang meninggal dunia, 1 orang peneliti pindah instansi, dan 1 orang peneliti lainnya berhenti dari jabatan peneliti. Sementara itu, pada tahun 2018 Puslit memperoleh tambahan calon peneliti sebanyak 5 orang yang telah ditetapkan sebagai PNS dan dilantik menjadi Peneliti Pertama. Demikian pula, pada 2019 terdapat penambahan 9 orang Peneliti Pertama dan 4 orang staf pengelola data di Bagian Tata Usaha Puslit. Dengan demikian, total untuk jumlah peneliti Puslit hingga akhir tahun 2020 berjumlah 85 orang.

Apabila dilihat secara kualitas, yang antara lain melalui tingkat pendidikan maka kualifikasi dan kompetensi para peneliti sudah cukup memadai. Namun apabila dilihat dari kuantitas dan komposisi per bidang, jumlahnya belum merata, sehingga jumlah peneliti Puslit masih perlu ditambah, agar dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada DPR RI. Penambahan jumlah peneliti diharapkan dapat menghasilkan perbandingan yang lebih proporsional antara jumlah peneliti dengan jumlah Anggota DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD). Di samping itu, penambahan jumlah peneliti diperlukan agar komposisi dalam setiap bidang lebih berimbang dan sesuai dengan kebutuhan DPR RI. Kualifikasi peneliti juga perlu semakin diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.

Untuk mengoptimalkan dukungan keahlian kepada DPR RI, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan idealnya jumlah peneliti pada Puslit sebanyak 150 orang, dengan latar belakang seluruh disiplin ilmu yang dibutuhkan, seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lain-lain secara proporsional. Jumlah tersebut

didasarkan pada kebutuhan pembedanaan di setiap AKD dan Pimpinan DPR RI sehingga dapat dicapai rasio ideal antara jumlah Anggota DPR RI dan jumlah peneliti yang melayani (4:1).

### **3. Sarana dan Prasarana**

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 turut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Puslit. Kebijakan *work from home* (WFH) menyebabkan pekerjaan banyak dikerjakan dari rumah. Hal itu membutuhkan sarana kerja yang memadai. Hingga saat ini sebagian besar peneliti masih lebih banyak menggunakan *laptop* milik pribadi untuk melaksanakan tugas dari rumah. Oleh karena itu masih dibutuhkan penambahan *laptop* untuk peneliti yang berjumlah 85 orang.

Selain itu, beberapa permasalahan sarana dan prasarana yang masih dihadapi hingga saat ini antara lain:

- (1) Ketersediaan ruang kerja peneliti belum berorientasi kepada kebutuhan penambahan jumlah peneliti,
- (2) Pengadaan fasilitas komputer/*laptop* serta *printer* dan *scanner* yang sangat terbatas. Selain itu, komputer/*laptop* serta *printer* masih berbeda-beda standar kualitasnya,
- (3) Masih kurangnya akses data dan informasi dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian,
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, peneliti memerlukan data dari Bidang Arsip dan Museum serta Bidang Data dan Informasi. Oleh karena itu Puslit membutuhkan dukungan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga peneliti dapat melaksanakan tugasnya secara lebih optimal,
- (5) Fasilitas berlangganan jurnal *online*, terutama jurnal dari luar negeri masih sangat terbatas, dan

- (6) Ketersediaan jumlah toilet yang masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai.

#### **4. Mekanisme Kerja dengan Unit Kerja Lain**

Pada tahun 2020 akhirnya Badan Keahlian memiliki Kepala Badan Keahlian yang baru. Tidak lama setelah dilantik, Kepala Badan Keahlian melakukan koordinasi dengan jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, terutama para Kepala Bagian Sekretariat (Kabagset) AKD di mana di dalamnya terdapat para tenaga ahli. Sebagai bagian dari Badan Keahlian, Puslit terlibat dalam aktivitas tersebut. Hingga saat ini kedua lembaga sudah mulai bersinergi, meskipun masih terus mencari bentuk dan pola mekanisme koordinasi yang ideal.

Terkait dengan unit kerja lain yang melaksanakan dukungan keahlian, baik di lingkungan Badan Keahlian DPR RI maupun Setjen DPR RI, meskipun telah disusun standar mekanisme kerja dengan Peraturan Kepala Badan Keahlian DPR RI No. 01 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerja Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun implementasinya belum optimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Puslit untuk membentuk mekanisme kerja yang implementatif sehingga dapat memberikan dukungan keahlian yang optimal bagi DPR RI.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### *Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja*

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi

Visi Puslit sejalan dengan Visi Setjen DPR RI yang tercantum dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Visi yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi DPR RI. Adapun visi DPR RI periode 2020-2024 adalah **“Menjadi lembaga perwakilan yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan tujuan bernegara”**. Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI memiliki visi sebagai berikut:

***Menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia***

**Profesional** ditujukan pada Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Sedangkan yang yang dimaksud dengan **modern** adalah mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Visi tersebut merupakan cerminan dari cita-cita dan harapan Setjen DPR RI untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan serta mewujudkan lingkungan kerja yang memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. SDM di lingkungan Setjen DPR RI juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan dan mendukung tercapainya visi diperlukan upaya untuk menjembatani antara Visi dan tujuan institusi. Adapun Misi Setjen DPR RI adalah:

- 1. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,*
- 2. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan*
- 3. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

## **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, tujuan Puslit adalah:

1. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih,
2. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap, dan
3. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

#### **4. Sasaran**

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 3 sasaran yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Setjen DPR RI pada akhir periode perencanaan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR Ri atas dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,*
2. *Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan*
3. *Terlaksanannya Keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik*

### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Sasaran dari program Puslit selanjutnya dijabarkan secara lebih luas ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Puslit. RKT akan menjadi dasar menyusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran, kegiatan, indikator kinerja, dan target berdasarkan ketersediaan anggaran dan prioritas kegiatan Puslit. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

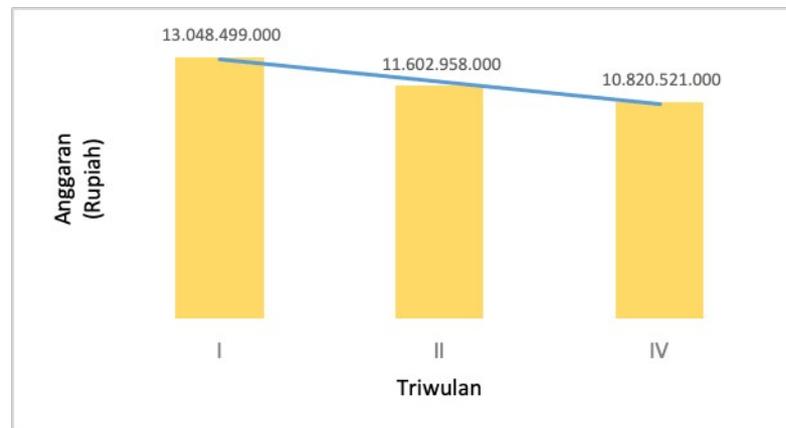
Puslit telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2020. Perjanjian kinerja Puslit tersebut berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai sepanjang periode tahun 2020. Setiap sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tersebut kemudian diukur tingkat keberhasilan atau kegagalannya pada akhir periode tahun 2020. Perjanjian kinerja Puslit pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan</b>	1. Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , Prosiding Seminar yang dipublikasikan	100%
	2. Jumlah dokumen administrasi Puslit	4 dokumen

Sumber: Puslit, 2020.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 tersebut tentunya membutuhkan anggaran. Pada dokumen perjanjian kinerja, dialokasikan dana untuk kegiatan Puslit dengan pagu anggaran sebesar Rp13.048.499.000. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan *refocusing* anggaran, di mana sebagian anggaran Setjen DPR RI dialihkan ke pemerintah pusat. Pada Triwulan II anggaran Puslit turun menjadi Rp11.602.958.000. Pada Triwulan IV, untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 di lingkungan Setjen DPR RI, anggaran Puslit kembali mengalami revisi menjadi Rp10.820.521.000 (Gambar 5).



Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 5.** Revisi Anggaran Puslit Tahun 2020

## **BAB III. PENGUKURAN KINERJA**

*Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan*

### **A. Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian**

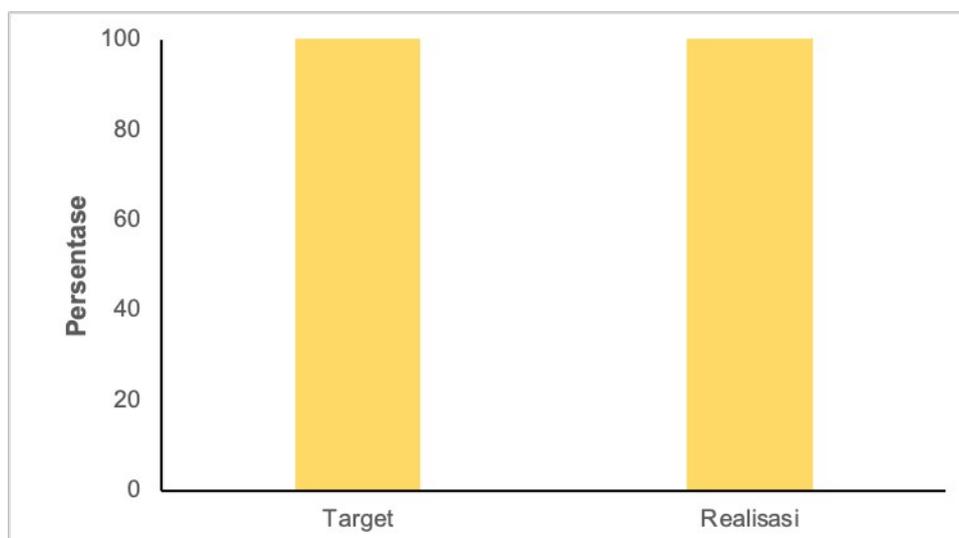
Capaian kinerja Puslit sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar 100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja Puslit dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara kuantitatif kinerja puslit tercapai 100% akan tetapi bila dilihat secara kualitas tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan. Bila dilihat dari sisi anggaran, anggaran Puslit tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 26%, menjadi Rp10.820.521.000. Penurunan ini merupakan dampak dari bencana pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, penurunan anggaran ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan Puslit. Dengan anggaran yang terbatas Puslit tetap bisa merealisasikan kegiatan yang semula akan didanai dengan anggaran sebesar Rp13.048.499.000.

Pada Tabel 6, Gambar 8, dan Gambar 9 disajikan pengukuran tingkat capaian kinerja Puslit tahun 2020 dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

**Tabel 6.** Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian Tahun 2020

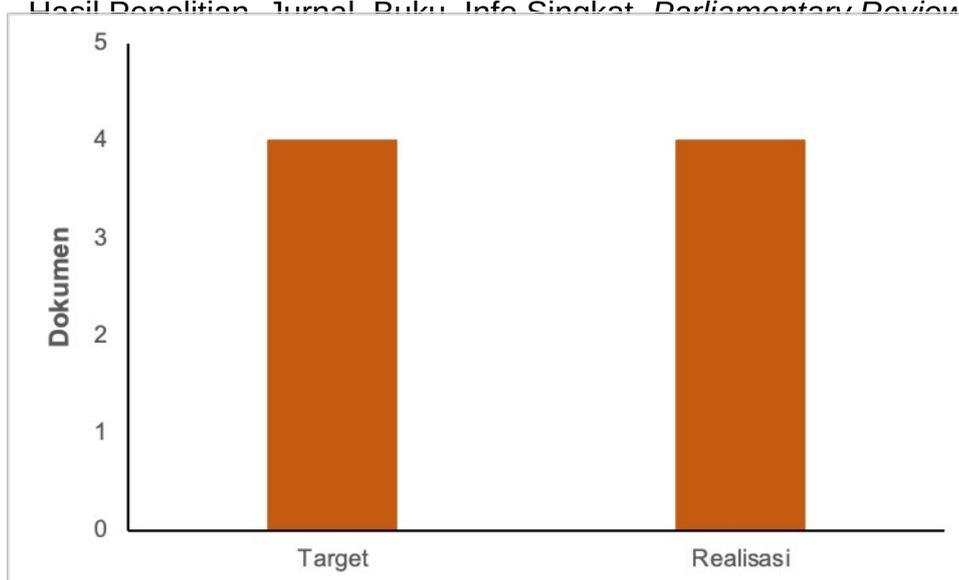
Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	Hasil penelitian, jurnal, buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , Prosiding Seminar yang dipublikasikan	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen administrasi Puslit	4 dokumen	4 dokumen	100%
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>100%</b>

Sumber: Puslit, 2020.



Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 6.** Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian berupa Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*



Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 7.** Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian berupa Jumlah Dokumen Administrasi Pusat Penelitian Tahun 2020

**Tabel 7.** Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Pusat Penelitian Tahun 2020

Kegiatan	Rencana	Realisasi	Capaian
1. Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , <b>Prosiding Seminar yang dipublikasikan</b>	100%	100%	100%
2. <b>Jumlah dokumen administrasi Puslit</b>	4 dokumen	4 dokumen	100%
<b>Keuangan</b>	Rp10.820.521.000	Rp10.552.139.885	97,52%

Sumber: Puslit, 2020.

Pengukuran kinerja Puslit tahun 2020 dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Tabel 6. Pada akhir tahun 2020, Puslit telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja tersebut diperoleh dari pelaksanaan sasaran strategis, yaitu tersedianya kajian/analisis tentang

kedewanan. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam 2 indikator kinerja, yaitu:

A. Indikator kinerja yang *pertama*, yaitu hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, Prosiding Seminar yang dipublikasikan (Tabel 7) menunjukkan bahwa target pencapaian akuntabilitas tahun 2020 terhadap indikator kinerja utama (IKU) Puslit telah berhasil terealisasi seluruhnya sebanyak 100%. Jenis dan jumlah *output* dari indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Rekapitulasi Produk Pusat Penelitian Tahun 2020

No.	Kegiatan	Jumlah	Produk
1.	Penelitian AKD	15	Laporan
2.	Penelitian Kelompok	20	Laporan
3.	Jurnal Negara Hukum	2	Jurnal
4.	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik	2	Jurnal
5.	Jurnal Aspirasi	2	Jurnal
6.	Jurnal Politika	2	Jurnal
7.	Jurnal Kajian	4	Jurnal
8.	Buku	22	Buku
9.	Info Singkat	24	Majalah
10.	<i>Parliamentary Review</i>	4	Jurnal
11.	Prosiding Seminar	4	Prosiding
12.	Survei Kepuasan Pengguna Layanan	1	Laporan
13.	Seminar	10	Laporan
14.	Isu Sepekan	20	Analisis Singkat
	Jumlah	<b>132</b>	

Sumber: Puslit, 2020.

B. Indikator kinerja yang *kedua*, yaitu jumlah dokumen administrasi Puslit. Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen, seluruhnya berhasil direalisasikan seperti yang disebutkan dalam Tabel 8. Dokumen yang telah disusun mencakup (a) rencana kegiatan Puslit, (b) rencana keuangan Puslit, (c) laporan pertanggungjawaban Puslit, dan (d) laporan kinerja Puslit.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

### **1. Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok yang dilaksanakan oleh para peneliti Puslit. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Puslit, yaitu mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel. Penelitian dilakukan sesuai dengan tahapan penelitian yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi Penelitian (TKP), yaitu pra penelitian (penentuan tema, penyusunan proposal), penelitian (pelaksanaan penelitian di 2 lokasi penelitian, penyusunan *interim report* dan laporan kegiatan di lokasi penelitian, penyusunan laporan penelitian dan *executive summary*), serta pasca penelitian (penyerahan laporan penelitian kepada kepala Puslit dan Pimpinan AKD, penyusunan infografis hasil penelitian, publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku/jurnal/karya tulis ilmiah lainnya).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Puslit didasarkan pada tema, topik, atau bidang masalah yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Anggota DPR RI. Untuk penentuan tema, topik, dan masalah tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu permintaan dari AKD atau pengajuan usul dari masing-masing kelompok penelitian/para peneliti. Penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari 15 penelitian berdasarkan permintaan AKD dan 20 penelitian kelompok.

Semua kegiatan penelitian memberikan *output* berupa laporan penelitian, *executive summary*, dan infografis. Laporan penelitian sesuai permintaan AKD disampaikan kepada AKD yang bersangkutan. Di samping itu, hasil penelitian menjadi dasar bagi para peneliti dalam penulisan buku dan jurnal. *Executive summary* hasil penelitian tahun 2020 dicetak dalam bentuk buku laporan. Sedangkan infografis diunggah pada *website* Puslit sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas.

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Maret 2020 telah memengaruhi pelaksanaan penelitian di tahun ini, antara lain:

- a. Pelaksanaan penelitian berdasarkan permintaan AKD dan/atau penelitian kelompok ke lokasi penelitian baru dapat dilakukan lagi setelah Juli 2020.
- b. Penggantian judul/tema atau daerah/lokasi penelitian menjadi *trending* dikarenakan peneliti berusaha untuk tidak menggunakan transportasi umum yang telampau jauh atau lama, sehingga daerah penelitian menjadi cenderung homogen, yaitu sekitar Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
- c. Banyak *stakeholders* di daerah yang tidak berkenan menerima peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara *offline*.
- d. Pengalihan sebagian besar anggaran penelitian untuk penanggulangan Covid-19.
- e. Penyerahan hasil penelitian kepada AKD menjadi tertunda sehingga *outcome* dari kegiatan penelitian terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang DPR RI belum terwujud secara optimal.
- f. Sosialisasi hasil penelitian belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal oleh setiap kelompok penelitian.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh TKP untuk meningkatkan kualitas penelitian, sebagai berikut (a) tata cara dan prosedur penelitian perlu diperbaiki agar lebih ringkas dan tidak memakan waktu yang panjang. Kewenangan TKP terhadap pelaksanaan penelitian juga perlu diatur lebih lanjut dan (b) penelitian berdasarkan permintaan AKD perlu ditinjau kembali mengenai pelaksanaan dan hasil penelitiannya. Anggaran untuk penelitian berdasarkan permintaan AKD harus disamakan dengan anggaran penelitian kelompok. Laporan penelitian juga harus diserahkan kepada AKD yang mengusulkan tema/topik. Dalam penentuan topik penelitian berdasarkan permintaan AKD perlu mekanisme yang dapat melibatkan seluruh kepakaran peneliti dengan memperhatikan waktu yang



ir seluruh kepakaran

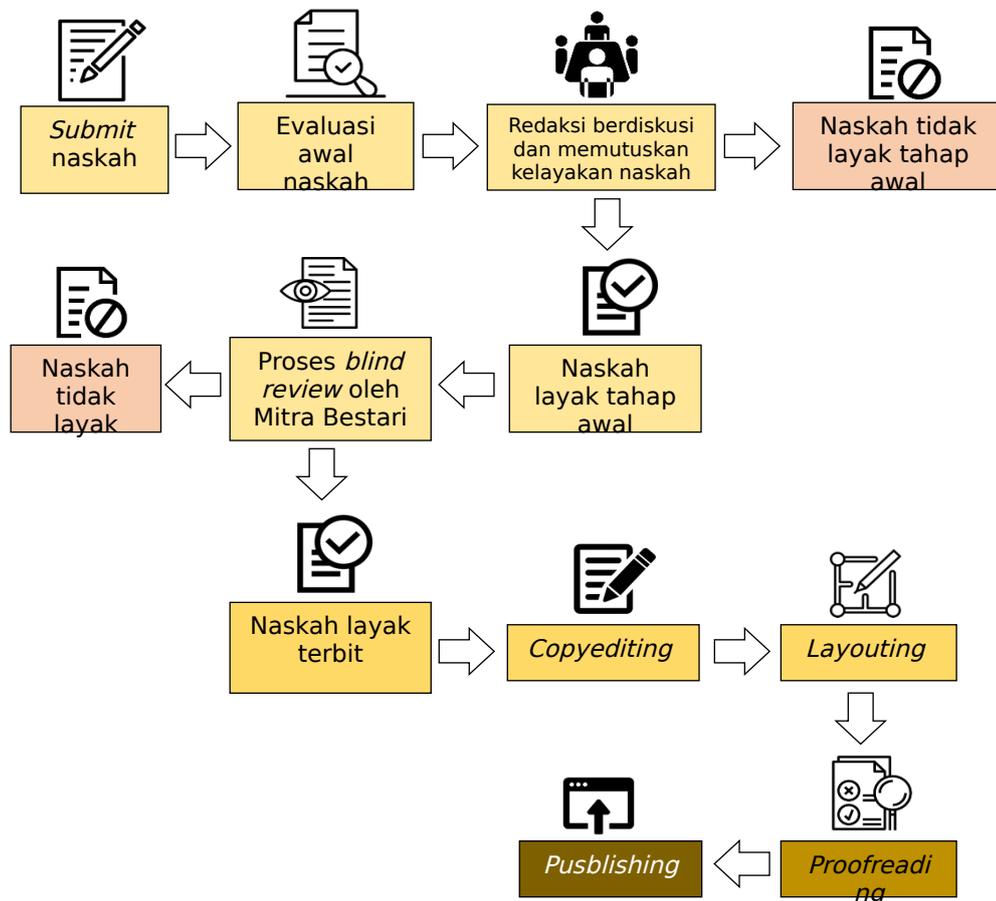
**Gambar 8.** Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

## **2. Jurnal Ilmiah**

Puslit memiliki produk atau karya tulis ilmiah berupa jurnal, yaitu Jurnal Negara Hukum (JNH), Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP), Jurnal Aspirasi, Jurnal Politca, dan Jurnal Kajian. Kelimanya memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda sesuai dengan bidang dan isu yang menjadi sasaran dan perhatian. Selain itu, frekuensi penerbitan masing-

masing jurnal dalam setahun juga berbeda-beda dan pada bulan yang beragam.

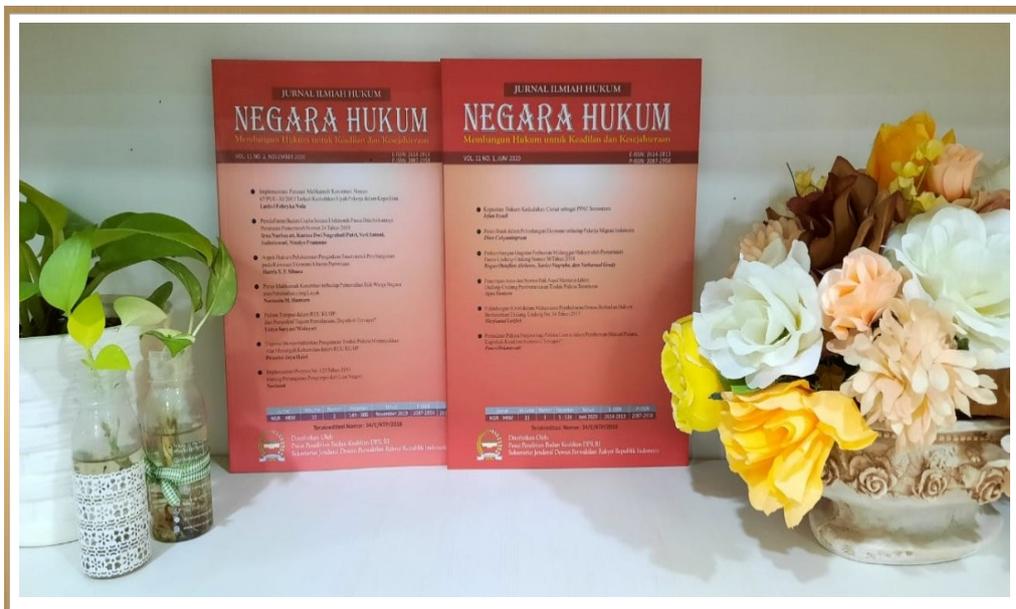
Secara umum alur pengelolaan naskah (*paper*) hingga penerbitan jurnal memiliki pola yang sama ketika proses pengelolaannya dilakukan melalui *open journal system* (OJS). Detailnya disajikan pada Gambar 8. Di sisi lain, beberapa redaksi jurnal masih mengaplikasikan metode “setengah” OJS atau mengkombinasikan antara OJS dengan *submit* manual karena mensiasati keterbatasan, baik jumlah SDM maupun informasi penggunaan OJS oleh penulis dan Mitra Bestari (MB).



**Gambar 9.** Alur Pengelolaan Naskah pada Jurnal

**a. Jurnal Negara Hukum**

Penerbitan Jurnal Negara Hukum (JNH) merupakan salah satu bentuk kontribusi dukungan keahlian yang diberikan oleh peneliti bidang hukum kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya. JNH berisi hasil penelitian dan kajian dari para peneliti dari berbagai kepakaran di bidang ilmu hukum. Kepakaran yang dimaksud adalah hukum tata negara/hukum konstitusi, hukum ekonomi/perdata, hukum pidana, dan hukum internasional. Tahun ini memasuki tahun yang kesebelas penerbitan dan JNH telah terakreditasi **Sinta 2** sejak tahun 2018.



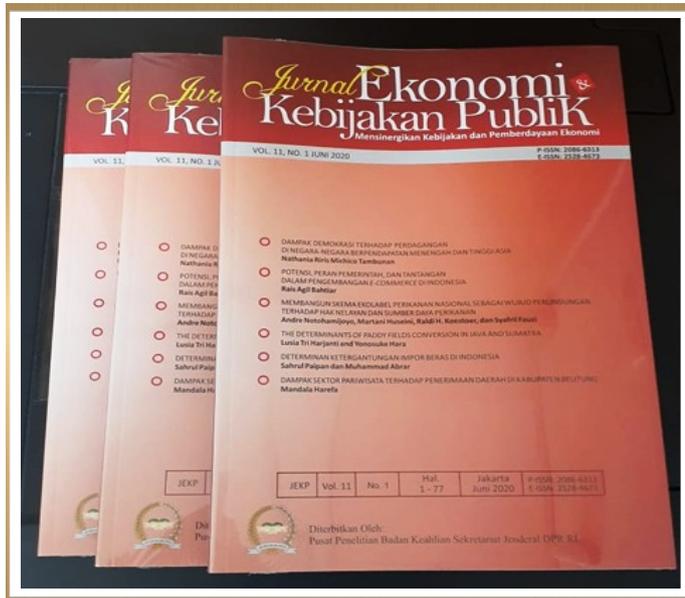
**Gambar 10.** Jurnal Negara Hukum

Penerbitan JNH dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Juni dan November. Untuk terbitan Juni 2020 terdapat 6 tulisan yang layak dimuat, terdiri atas 3 tulisan dari penulis internal dan 3 tulisan dari penulis luar. Sedangkan untuk edisi November 2020 ada 8 tulisan yang layak dimuat, dengan komposisi 3 tulisan dari penulis internal dan 5 tulisan dari penulis luar.

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi redaksi JNH dalam pengelolaannya, yaitu (1) keterlibatan Mitra Bestari (MB) sebagai reviewer yang bukan merupakan anggota dewan redaksi merupakan hal yang penting. Pemilihan MB yang sesuai dengan substansi artikel menjadi kendala ketika MB yang ditentukan terlalu sibuk, sehingga terlambat menyampaikan hasil *review*-nya. Di samping itu, kadang kala MB memberikan masukan yang sangat minim dan bahkan ada yang menolak *me-review* artikel yang bukan termasuk bidang kepakarannya, pada saat *deadline* waktu yang diberikan kepada MB untuk *me-review*, (2) untuk abstrak dan artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris dibutuhkan koreksi dari ahli yang selain mempunyai kemampuan dalam Bahasa Inggris juga memahami istilah baku dalam ilmu hukum. Sementara itu, tidak tersedia anggaran untuk honor ahli tersebut di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan (3) pada saat ini, dewan editor/redaksi, *administrator of journal website*, dan staf administrasi dirangkap oleh peneliti bidang hukum. Hal ini mengakibatkan berkurangnya waktu peneliti hukum untuk mengerjakan tugas pokoknya. Untuk itu disarankan agar di dalam dewan editor/redaksi terdapat unsur dari luar, dan *administrator of journal website* dan staf administrasi tidak lagi dirangkap oleh peneliti hukum. Hal ini membutuhkan dukungan SDM dan anggaran.

#### **b. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik**

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP) menaruh perhatian terhadap isu ekonomi dan kebijakan publik. Pengelolaan JEKP dilaksanakan oleh para peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik. Pada tahun 2020, JEKP telah menerbitkan 2 nomor, yaitu Vol. 11 No. 1, Juni 2020 dan Vol. 11, No. 2, Desember 2020. Pada 3 Agustus 2020, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik telah mendapatkan hasil penilaian akreditasi jurnal ilmiah (**Sinta 2**) dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.



**Gambar 11.** Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

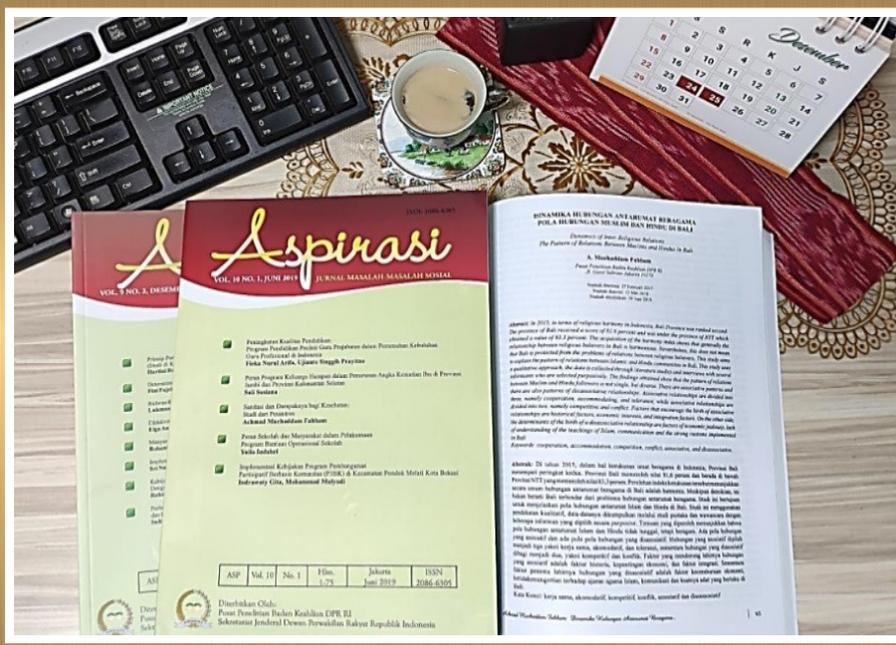
Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh redaksi dalam penerbitan di tahun 2020 ini, antara lain (1) jumlah naskah yang masuk dari internal Puslit masih minim dan adanya calon penulis belum terbiasa menggunakan OJS dan jika terjadi gangguan jaringan pada server pengguna maka harus mengulang kembali proses *submit*, (2) masih kurangnya *skill* dan pengetahuan redaksi tentang pengelolaan jurnal bereputasi sehingga sangat diperlukan pelatihan OJS yang kontinyu dan studi banding ke jurnal-jurnal lain yang bereputasi (terindeks Sinta 2), (3) belum adanya aplikasi untuk membuat *layout* mandiri agar proses penerbitan menjadi lebih cepat. Selama ini proses revisi *dummy* terkendala dalam usaha ketepatan waktu untuk di-*publish* pada OJS. Selain itu, dibutuhkan penguasaan teknis *layout* oleh redaksi. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan penyediaan *software*, salah satunya *InDesign*, (4) permasalahan teknis pada email jurnal yang berdampak pada terlambatnya lalu lintas email dan hal tersebut akan telah diinformasikan ke Kapuslit untuk penanganannya, (5) kualitas tulisan berbahasa Inggris harus ditingkatkan sehingga diperlukan anggaran untuk

penerjemah (*translator*) naskah jurnal dari Puslit. Sejauh ini, Puslit telah menggunakan fasilitas koreksi *Grammarly* yang dilanggan oleh bidang perpustakaan DPR RI untuk mengoreksi abstrak berbahasa Inggris, (6) jumlah MB untuk jurnal terindeks Sinta 2, saat ini masih dianggap belum ideal untuk *me-review* naskah yang masuk ke JEKP sehingga perlu menambah jumlah MB dan anggaran untuk honor MB. Idealnya 1 naskah *di-review* oleh 2 orang MB, dan bahkan membutuhkan 3 orang MB dalam hal putusan hasil *review* kedua MB sebelumnya saling bertentangan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pengelola jurnal akan mencoba menugaskan MB dari internal Puslit sesuai dengan kualifikasi/jenjang akademik yang dipersyaratkan, (7) sistem *reimbursement* untuk pembayaran honor narasumber sangat menyulitkan bagi redaksi karena harus menyediakan terlebih dahulu dananya, (8) perlu arahan pimpinan atas tata cara pembayaran honor MB dari luar negeri sebagai landasan penyiapan SOP sehingga redaksi jurnal dapat segera mendayagunakan MB luar negeri yang telah menyatakan kesediaannya dalam tahun 2020 ini, dan (9) perlunya rotasi/penyegaran kepemimpinan dewan redaksi jurnal untuk memastikan proses pembelajaran dan tata kelola jurnal yang semakin baik.

### **c. Jurnal Aspirasi**

Jurnal Aspirasi telah menjadi kanal publikasi para peneliti dengan lingkup kajian tentang kesejahteraan sosial dan isu-isu yang menjadi perhatian Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X. Artikel yang diterbitkan Jurnal Aspirasi meliputi bidang sosiologi, psikologi, pendidikan, lingkungan, agama, dan ketenagakerjaan, kesehatan.

Sejak tahun 2017, Jurnal Aspirasi telah menggunakan OJS dalam rangka meningkatkan kualitas, akses publikasi, dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi jurnal dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat ini, redaksi



20

Aspirasi dari Kementerian Riset dan Teknologi untuk terakreditasi Sinta 2. Untuk tahun 2019, telah dipublikasikan 2 nomor, yaitu Januari dan Mei, masing-masing sebanyak 8 artikel.

**Gambar 12.** Jurnal Aspirasi

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Jurnal Aspirasi, antara lain (1) perlu perbaikan *policies, focus & scope, editorial board, peer-reviewer, author guidelines, authorship agreement, copyright transfer agreement, template*, dan *setting OJS* dan (2) perlu mendaftarkan untuk dapat diindeks ISJD dan DOAJ. Sedangkan yang masih menjadi tantangan pengelolaan Jurnal Aspirasi tahun ini, antara lain (1) kualitas artikel yang diterima belum sesuai dengan gaya selingkung Jurnal Aspirasi, (2) rendahnya komitmen penulis untuk menyelesaikan revisi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan (3) Jurnal Aspirasi masih membutuhkan panduan yang jelas dan tegas mengenai: pengulasan artikel oleh

redaksi dan oleh MB.

#### d. Jurnal Politica

Penerbitan Jurnal Politica merupakan bentuk dukungan keahlian oleh peneliti bidang hubungan internasional (HI) dan politik dalam negeri (PDN) kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya. Jurnal Politica menyetengahkan karya tulis ilmiah baik hasil penelitian dan kajian dari berbagai kepakaran di bidang hubungan internasional dan politik dalam negeri.

Sebagai sebuah jurnal ilmiah, Jurnal Politica juga memberi kesempatan kepada para penulis luar Puslit untuk berpartisipasi dalam penulisan. Sejak tahun 2019, Jurnal Politica telah melaksanakan proses penerbitan melalui OJS. Informasi terkait Jurnal Politica seperti *call of papers*, pengelolaan naskah, dan artikel yang sudah diterbitkan dapat diakses melalui laman <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/Politica>.



**Gambar 13.** Jurnal Politica

Penerbitan Jurnal Politica dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Mei dan November. Tahun 2020 merupakan tahun kesebelas penerbitan Jurnal Politica (sejak November 2010). Redaksi telah menerbitkan 2 edisi Jurnal Politica di tahun ini, yaitu Vol. 11 No. 1, Mei 2020, dan Vol. 11 No.

2, November 2020 dengan jumlah tulisan sebanyak 6 artikel per terbitan. Komposisi tulisan pada kedua terbitan tersebut lebih banyak berasal dari luar Puslit dari pada dari internal Puslit. Hal ini dikarenakan minimnya tulisan yang masuk ke redaksi dari internal Puslit.

Beberapa kendala yang dihadapi redaksi dalam 2 kali penerbitan Jurnal *Politica* tahun ini, yaitu (1) keterbatasan anggaran honor MB dalam DIPA untuk *me-review* tulisan dan sistem pembayaran dengan *reimbursement*. Setiap tulisan di-*review* oleh 2 orang MB dan dengan sistem pembayaran *reimburse* maka redaksi harus menalangi pembayarannya. Bagi MB yang berasal dari luar DKI Jakarta, redaksi memerlukan waktu lebih banyak sehingga berpotensi mengganggu proses penerbitan. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan rapat maupun diskusi harus dilakukan virtual sehingga komunikasi secara langsung mengalami hambatan, walaupun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik, (2) banyaknya tulisan yang masuk berbahasa Inggris dan seharusnya di-*review* oleh orang yang memahami Bahasa Inggris dengan baik. Namun anggaran yang tersedia pada DIPA untuk *translater* bukan *reviewer*. Diharapkan dapat tersedianya anggaran untuk *reviewer* Bahasa Inggris dengan sistem pertanggungjawaban anggaran yang tidak sulit, dan (3) keterbatasan jumlah SDM dalam sistem pengelolaan jurnal menjadi hambatan tersendiri. Dewan editor/redaksi, *administrator of journal website*, dan staf administrasi jurnal dilakukan oleh para peneliti yang masih harus melaksanakan tugas dan kegiatan lainnya sebagai peneliti. Untuk itu diharapkan adanya SDM dari luar kedua bidang tersebut untuk terlibat dalam pengelolaan Jurnal *Politica*.

#### **e. Jurnal Kajian**

Jurnal Kajian merupakan media penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kepada Anggota DPR RI khususnya dan masyarakat luas pada umumnya



...es pembuatan keputusan  
...ngelolaan Jurnal Kajian  
...gai bidang, yaitu bidang  
...eri, kesejahteraan sosial,  
...urnal Kajian terbit 4 kali

dalam setahun. Pada tahun 2020, Jurnal Kajian telah menerbitkan 4 nomor dalam 1 volume, yaitu Vol. 25 No. 1, Vol. 25 No. 2, Vol. 25 No. 3, dan Vol. 25 No. 4 dengan masing-masing 5 tulisan di setiap terbitan.

**Gambar 14.** Jurnal Kajian

Beberapa kendala dalam pengelolaan Jurnal Kajian di tahun 2020, yaitu (1) terdapat 1 tulisan yang tidak dilanjutkan perbaikannya oleh penulis selama tahun 2020, (2) adanya pandemi Covid-19, cukup mengganggu kegiatan penerbitan di mana kegiatan rapat internal redaksi maupun dengan MB dilakukan secara virtual yang sangat bergantung pada koneksi internet. Tidak jarang koneksi internet yang kurang baik terjadi, sehingga kegiatan diskusi tidak optimal, dan (3) pandemi Covid-19 juga cukup mengganggu kegiatan peneliti di Puslit sehingga artikel dari

internal Puslit cenderung masuk di akhir tahun sehingga semua proses penerbitan dilakukan sebelum akhir tahun. Sedangkan artikel yang berasal dari luar Puslit sangat sedikit jumlahnya.

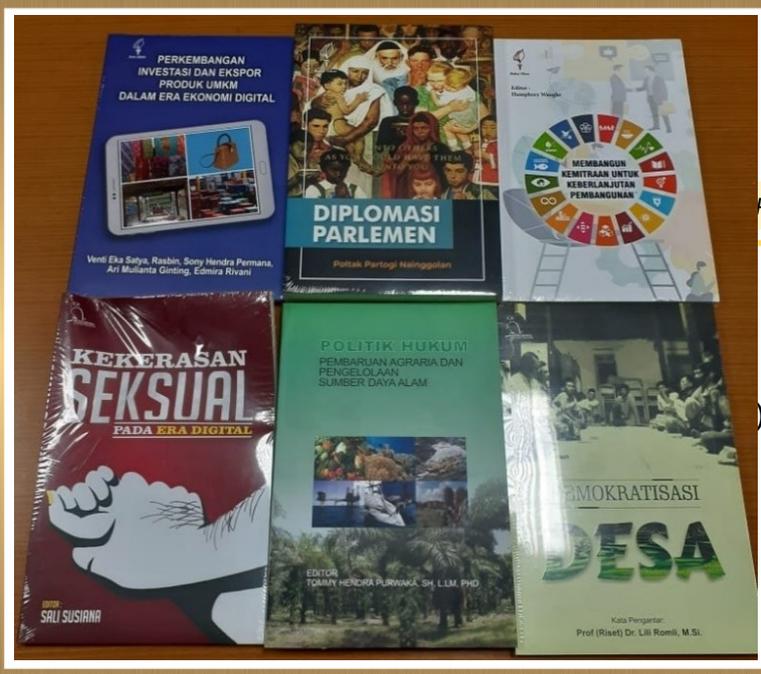
Ke depan, redaksi akan melakukan promosi *call for paper* lebih intensif untuk menjaring artikel yang masuk. Selain itu, melakukan perbaikan sistem pengelolaan Jurnal Kajian sehingga proses penerbitan Jurnal Kajian tidak menumpuk di akhir tahun.

### **3. Buku**

Kegiatan penerbitan buku merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh para peneliti Puslit. Kegiatan penerbitan buku menjadi hal yang sangat penting agar penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media buku dapat disampaikan kepada para Anggota DPR RI pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, penerbitan buku juga dapat menunjang karir peneliti melalui diseminasi hasil penelitiannya.

Pada tahun 2020, Puslit menerbitkan 22 buku yang terdiri dari 8 buku individu dan 14 buku tim. Penerbitan 22 buku tersebut dilakukan bekerja sama dengan 2 penerbit, yaitu 15 buku dicetak oleh Penerbit Obor dan 7 buku dicetak oleh Penerbit Intrans. Buku Individu merupakan buku yang ditulis Peneliti secara perorangan, sedangkan Buku Tim adalah buku yang ditulis oleh beberapa peneliti Puslit.

Adapun alur penerbitan buku selama tahun 2020, yaitu (1) semua penulis telah menyelesaikan tulisannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Buku, (2) *draft* buku kemudian diserahkan oleh Penulis kepada koordinator masing-masing buku, (3) koordinator buku memastikan *draft* buku yang diterimanya telah memenuhi persyaratan Karya Tulis Ilmiah (KTI) agar buku yang diterbitkan berkualitas, (4) *draft* buku diserahkan oleh Koordinator Buku kepada Tim Buku untuk dibahas dalam rapat apakah layak/tidaknya *draft* buku untuk diterbitkan, (5) ketua



buku yang akan dicetak dan diterbitkan  
 Kepala Puslit menyerahkan *draft* buku

**Gambar 15.** Buku-Buku Hasil Penelitian

Beberapa kendala atau hambatan dalam penerbitan buku, antara lain (1) pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan jadwal penerbitan dikarenakan keterbatasan ruang gerak dan waktu penulis dalam menyelesaikan kegiatan dan beban kerjanya yang lain sehingga penyelesaian *draft* buku membutuhkan waktu yang lebih lama. Akibatnya hampir semua buku selesai pada akhir batas waktu penyusunan buku, (2) ada beberapa buku tim yang tidak dapat terlaksana. Hal ini khususnya untuk buku-buku yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian tahun berjalan, (3) *draft* buku tidak bisa segera diserahkan oleh penulis karena menunggu koreksian/masukan dan *editing* dari editor, (4) masih ada beberapa penulis terutama Peneliti Muda yang belum benar-benar memahami cara penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) sehingga

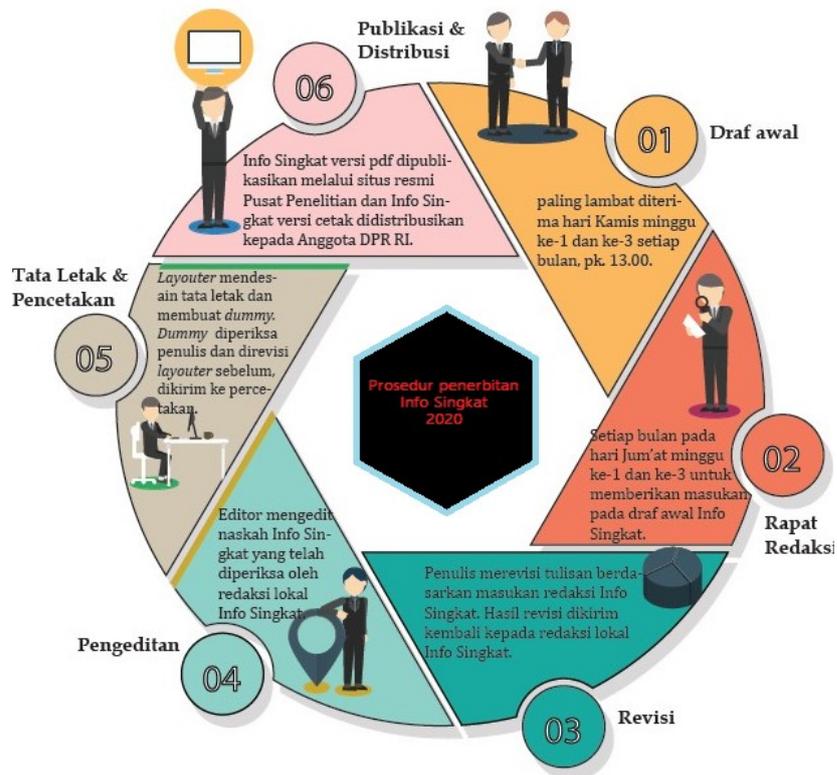
memerlukan waktu untuk penyusunan dan *editing* buku, dan (5) hanya ada 2 penerbit yang mencetak sebanyak 22 buku dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan (November dan Desember) sehingga terjadi keterlambatan pencetakan buku karena proses cetak buku membutuhkan cukup waktu.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk penerbitan buku di tahun 2021, antara lain (1) adanya perubahan strategik khususnya kepada buku yang merupakan hasil penulisan berdasarkan penelitian tahun berjalan, (2) menghimbau kepada penulis untuk segera menyelesaikan *draft* final bukunya agar segera dapat dicetak sehingga pencetakan buku tidak menumpuk di akhir batas waktu penyusunan buku, (3) perlu memberikan batas akhir (*deadline*) kepada editor kapan masukan/koreksian/hasil *editing* harus sudah diserahkan kepada Penulis, (4) untuk meningkatkan kualitas calon peneliti dan peneliti baru, diperlukan diklat penulisan KTI untuk PNS dan peneliti baru. Penyelenggaraan diklat tersebut dapat bekerja sama dengan bagian Diklat Setjen DPR RI atau dengan menggunakan forum FGD jika hanya 3 jam, dan (5) memperbanyak penerbit buku ilmiah yang telah memenuhi standar akreditasi penerbitan buku Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), agar pencetakan dan penerbitan buku segera dapat diselesaikan.

#### **4. Info Singkat**

Info Singkat memuat kajian singkat terhadap isu aktual dan/atau strategis yang perlu mendapat perhatian DPR RI dari 5 bidang kajian yang ada di Puslit (politik dalam negeri, hukum, ekonomi dan kebijakan publik, kesejahteraan sosial, dan hubungan internasional). Info Singkat ditulis oleh peneliti Puslit untuk memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI akan informasi dan bahan masukan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Info Singkat terbit dua pekan sekali dalam satu bulan. Pada tahun 2020 telah terbit 24 edisi info singkat dengan volume XII. Hal baru terkait penerbitan Info Singkat pada tahun

2020 yaitu telah tersaji Info Singkat edisi Bahasa Inggris yang ditampilkan secara *online* di *website* Puslit. Adapun alur kerja penerbitan Info Singkat dapat dilihat pada Gambar 16.



**Gambar 16.** Alur Penerbitan Info Singkat

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan Info Singkat pada tahun 2020, antara lain, adalah (a) *draft* tulisan yang diterima redaksi belum semuanya memenuhi ketentuan penulisan ilmiah dan panduan penulisan Info Singkat, (b) *draft* tulisan yang dibuat secara tandem (oleh dua penulis) belum semuanya terintegrasi dengan baik, terutama alur pembahasannya, (c) masih terjadi keterlambatan pengiriman *draft* tulisan dari penulis kepada redaksi dan penerbitan untuk sejumlah edisi cetak, dan (e) situasi pandemi Covid-19 telah membatasi pertemuan tatap muka anggota redaksi di kantor dalam membahas naskah Info Singkat yang akan diterbitkan.



**Gambar 17.** Info Singkat

Adapun solusi yang perlu dilakukan adalah (a) redaksi perlu terus mengingatkan penulis untuk memerhatikan ketentuan penulisan ilmiah dan panduan penulisan Info Singkat, (b) redaksi, terutama melalui redaksi bidang, perlu mengingatkan penulis tandem untuk berkoordinasi terlebih dahulu di antara penulis, terutama dalam menentukan sistematika tulisan, sebelum membuat tulisan secara tandem, (c) redaksi perlu mengingatkan penulis agar memerhatikan dan menaati ketentuan batas waktu pengiriman *draft* tulisan kepada redaksi, (d) redaksi, terutama melalui TU Puslit, perlu mengingatkan pihak percetakan untuk tidak terlambat dalam proses penerbitan Info Singkat, dan (e) jika situasi pandemi Covid-19 belum berakhir, redaksi perlu memaksimalkan pertemuan virtual atau media *online* e-mail untuk pemberian masukan atas *draft* Info Singkat yang akan diterbitkan.

## 5. Parliamentary Review

*Parliamentary Review* adalah salah satu produk karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Puslit, berisikan analisis mendalam terhadap sebuah

topik/isu strategis bagi DPR dilihat dari berbagai aspek (tematik). Tema utama dalam setiap penerbitan *Parliamentary Review* ditentukan oleh seluruh redaksi yang melingkupi 5 bidang di Puslit, yaitu hukum, ekonomi dan kebijakan publik, kesejahteraan sosial, politik dalam negeri, dan hubungan internasional. Pada tahun 2020, *Parliamentary Review* terbit 4 edisi, yaitu Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap edisi terdiri dari 5 tulisan yang mewakili setiap bidang yang ada di Puslit, kecuali untuk edisi Desember hanya terdiri dari 4 tulisan (bidang ekonomi dan kebijakan publik, bidang kesejahteraan sosial, bidang politik dalam negeri, dan bidang hubungan internasional).



**Gambar 18.** *Parliamentary Review*

Kendala yang dihadapi redaksi *Parliamentary Review* selama tahun 2020, yaitu (1) kesulitan mendapatkan MB yang memiliki kepakaran sesuai dengan substansi tulisan dan sanggup memberikan *review* dalam waktu singkat, (2) kesulitan mendapatkan penulis sesuai persyaratan dikarenakan kesibukan peneliti dan penolakan dari peneliti untuk menulis. Penulis tidak dapat menyelesaikan *draft* awal tulisan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh redaksi, (3) naskah awal tulisan menggunakan data hasil penelitian kelompok yang sedang dalam proses publikasi pada jurnal

lain, dan (4) kesulitan dalam mengedit naskah hasil revisi dikarenakan jumlah halaman yang jauh melebihi persyaratan pada pedoman penulisan.

Berdasarkan kendala yang terjadi maka redaksi *Parliamentary Review* memberikan rekomendasi untuk melakukan (1) memberdayakan peneliti Puslit yang memiliki kapabilitas dan kepakaran sesuai dengan substansi tulisan sebagai MB, (2) mempertimbangkan Peneliti Madya IVA untuk dapat menulis secara individual dan berkomitmen menyelesaikan tulisannya sesuai dengan pedoman penulisan dan jadwal yang ditetapkan, (3) panduan Penulisan perlu diperbaiki dengan memasukkan ketentuan orisinalitas tulisan sebagai hasil karya sendiri dan belum dipublikasikan, (4) perencanaan penulisan (topik dan penulis) bulan Desember perlu dipercepat untuk menghindarkan kendala dikarenakan naskah final harus selesai pada awal Desember, dan (5) jumlah halaman *Parliamentary Review* perlu dibuat lebih *compact* untuk memudahkan Anggota DPR RI dalam membaca dengan jumlah halaman naskah (*word*) 8-10 halaman.

## 6. Prosiding Seminar

Prosiding seminar yang diterbitkan oleh Puslit merupakan hasil dari pelaksanaan seminar yang diselenggarakan oleh Puslit. Pada tahun 2020, Puslit telah menyusun 4 buah buku prosiding, yaitu:

- a. **Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Normal Baru**, merupakan hasil kegiatan seminar secara virtual (*webinar*) Puslit bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Indonesia pada 29 Mei 2020.
- b. **Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan pada Era *New Normal***, merupakan hasil *webinar* Puslit pada 29 Juli 2020.
- c. **Urgensi Hasil Penelitian dalam Pembentukan Undang-Undang**, merupakan hasil *webinar* Puslit bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia pada 3 November 2020.
- d. **Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan**, merupakan kumpulan artikel/KTI telah dipresentasikan dalam



call for paper yang  
2020.

**Gambar 19.** Prosiding Seminar

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan prosiding, yaitu membutuhkan waktu cukup lama untuk proses perbaikan artikel dari penulis sesuai masukan panelis. Selain itu, tidak semua artikel yang diterima dan telah dipresentasikan dapat dipublikasikan dalam buku prosiding dikarenakan ada artikel yang ditarik kembali oleh penulisnya atau kualitas tulisan yang tidak memenuhi syarat minimal perbaikan yang diminta.

## **7. Survei Kepuasan Pengguna Layanan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Permenpan RB tersebut maka Setjen DPR RI menugaskan kepada Puslit untuk melakukan survei kepada Anggota DPR

RI sebagai penerima dukungan pelayanan (*user*) dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya di DPR RI.

Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. Survei tahun 2020 ini dilaksanakan pada bulan September–Desember 2020 untuk menilai kinerja Setjen DPR RI selama kurun waktu Januari–November 2020. Hasil survei sudah dapat diperoleh sebelum tahun anggaran 2020 berakhir sehingga dapat digunakan dalam pengisian Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Pada tahun 2020 ini dan dikarenakan pandemi COVID-19, survei dilakukan dengan menggunakan media digital yaitu *Google Form* dan isian manual melalui email. Selain itu, ada juga pengisian survei yang dilakukan melalui tatap muka/wawancara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Kuesioner disusun dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan Skala Likert 1 sampai dengan 4 (1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas). Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Setjen DPR RI. Unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam kuesioner, yaitu sebagai berikut (1) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, (2) Waktu Penyelesaian, (3) Produk Spesifikasi JenisLayanan, (4) Kompetensi dan Perilaku SDM, (5) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, (6) Sarana dan Prasarana, dan (7) Keahlian. Sebagai tambahan pertanyaan di tahun ini yaitu terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan Gedung DPR RI. Uji validitas dilakukan dengan teknik *Bivariate Pearson* (Korelasi *Pearson*

*Product Moment*) dengan derajat kepercayaan 95% dan didapat bahwa masing-masing butir pertanyaan pada kuesioner adalah valid.

Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Dengan menggunakan *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95%, didapat hasil sampel minimal adalah 231 responden yang terdiri dari 9 fraksi di DPR RI dengan total populasi 575 orang. Responden yang diambil pada survei kinerja Setjen DPR RI adalah Anggota DPR RI periode tahun 2019-2024 sebagai pengguna (*user*) layanan Setjen DPR RI.

**Tabel 9.** Hasil Survei Berdasarkan Fraksi

No.	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel	NI	NIK
1.	Fraksi PDIP	128	51	3,542	88,545
2.	Fraksi Partai Golkar	85	34	3,219	80,486
3.	Fraksi Partai Gerindra	78	31	3,064	76,592
4.	Fraksi Partai Nasdem	59	24	3,350	83,745
5.	Fraksi PKB	58	23	3,419	85,469
6.	Fraksi Partai Demokrat	54	22	3,074	76,854
7.	Fraksi PKS	50	20	3,018	75,450
8.	Fraksi PAN	44	18	3,180	79,496
9.	Partai PPP	19	8	3,260	81,496
	Jumlah	575	231	3,270	81,760

Sumber: Puslit, 2020. Diolah  
Keterangan: NI: Nilai Interval

NIK: Nilai Interval Konversi

Survei menghasilkan tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen dengan Nilai Interval 3,27 atau Nilai Interval Konversi (NIK) 81,76 termasuk dalam kategori “Baik”. Apabila dibandingkan dengan hasil survei atas kinerja 2019 yang NIK-nya mencapai 80,25, maka hasil survei tahun 2020 dengan NIK 81,76 terdapat kenaikan sebesar 1,51.

Karakteristik responden yang dihasilkan dalam survei ini yaitu 80% responden berjenis kelamin laki-laki dan 20% responden berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari lamanya keanggotaan responden sebagai Anggota DPR RI, 40,69% responden baru menjadi Anggota DPR RI, 35,93% responden telah menjadi Anggota DPR RI selama 2 periode, dan 23,38% responden telah menjadi Anggota DPR RI lebih dari 2 periode. Menariknya di sini, Anggota DPR RI yang telah lebih dari 2 periode memberikan nilai kepuasan paling tinggi terhadap layanan Setjen DPR RI (Tabel 9).

**Tabel 10.** Hasil Survei Berdasarkan Periode Responden Menjadi Anggota DPR RI

Lama Periode	Jumlah	NI	NIK
<b>1 (satu) periode</b>	94	3,366	84,138
<b>2 (dua) periode</b>	83	3,326	83,147
<b>Lebih dari 2 (dua) periode</b>	54	3,440	85,994
<b>Seluruh Responden</b>	231	3,270	81,760

Sumber: Puslit, 2020. Diolah

\*Keterangan: NI: Nilai Interval  
NIK: Nilai Interval Konversi

Survei juga menghasilkan tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah diberikan Puslit selama tahun 2020 yaitu dengan Nilai Interval 3,21 atau Nilai Interval Konversi 80,249 masuk dalam kategori

“Baik”. Salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan survei di tahun 2020 ini antara lain, yaitu pengisian survei umumnya dilakukan melalui *Google Form* dan pengiriman *email* sehingga apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh responden tidak dapat dijelaskan langsung oleh Setjen DPR RI. Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait pelaksanaan survei kepuasan pengguna terhadap dukungan Setjen DPR RI ini, yaitu (1) secara berkelanjutan, Setjen DPR RI diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerjanya, karena hal tersebut merupakan salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan prima sehingga dapat meminimalisir berbagai keluhan yang ada. Setjen DPR RI diharapkan memiliki kecakapan, keterampilan, serta mampu menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya sehingga penyelenggaraan dukungan yang berkualitas kepada DPR RI dapat terwujud, (2) survei ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan Setjen DPR RI dalam menyusun pertanggungjawaban dan perencanaan sehingga ada sinkronisasi kebutuhan antara perencanaan, pertanggungjawaban, dan peningkatan kualitas dukungan yang diselenggarakan, (3) perlu disampaikan kepada Anggota DPR RI, semacam panduan yang menjelaskan jenis layanan dan tata cara penggunaan layanan tersebut, baik layanan administrasi, persidangan maupun keahlian. Bagi Kesetjenan yang menyediakan layanan, agar ditetapkan SOP penyelenggaraannya, dan (4) khusus dukungan keahlian, perlu mengedepankan sinergi antar pusat di Badan Keahlian DPR RI dan harmoni dengan Tenaga Ahli dan Sekretariat di masing-masing AKD.

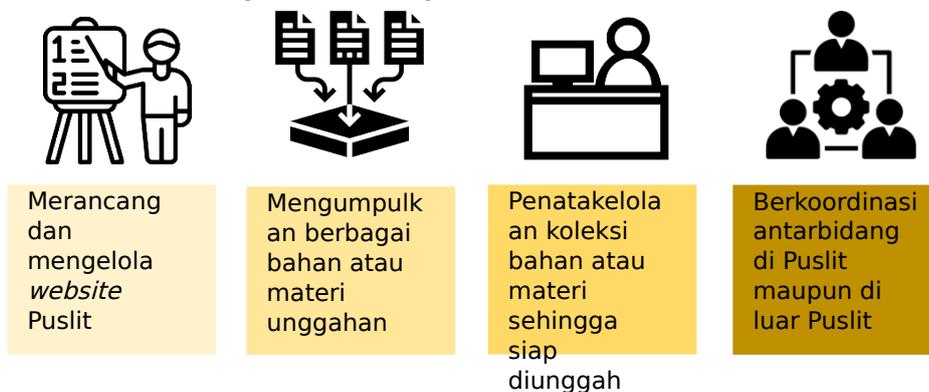
## **8. Website Pusat Penelitian**

*Website* Puslit merupakan salah satu *website* yang memiliki latar belakang untuk mendukung performa dari DPR RI melalui produk-produk penelitian atau kajian. Dukungan tersebut dapat bersifat langsung dengan produk para peneliti yang membidik kepada fungsi kedewanan maupun

secara tidak langsung melalui pesan, data, dan informasi yang tersebar luas kepada masyarakat. Data dan informasi yang tersaji secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tidak hanya menjadi pemantik bagi terciptanya *business process* yang baik bagi Puslit, namun juga membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Kehadiran *website* Puslit di dalam institusi parlemen Indonesia, [www.puslit.dpr.go.id](http://www.puslit.dpr.go.id), memberi warna yang berbeda. Hal tersebut terlihat dari produk-produk para peneliti yang beragam, baik tema atau pokok bahasan maupun jenis produknya. Keberagaman ini tetap dibalut dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat ilmiah, obyektif, dan nonpartisan. Oleh sebab itu, melalui *website* Puslit produk-produk para peneliti tersebut disebarluaskan atau di-diseminasikan kepada seluruh Anggota DPR RI dan masyarakat. Diseminasi membawa dampak positif lain, yaitu bagi pengembangan eksistensi para peneliti dan sekaligus mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

**Gambar 20.** Tugas Tim Pengelola *Website* Pusat Penelitian



Selama tahun 2020, Tim Pengelola *website* Puslit telah merealisasikan beberapa program kerja, yaitu (1) melakukan perubahan desain tampilan *website* Puslit, (2) memperbaiki fitur beberapa produk dari *website* Puslit, (3) memutakhirkan data dan informasi dari beberapa menu dalam *website* Puslit, baik yang bersifat statis maupun dinamis, (4) melakukan koordinasi dengan bagian Bidang Data dan Teknologi

Informasi (BDTI) Setjen DPR RI, dan (5) melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengelolaan *website* Puslit, baik sistem maupun manajemen serta potensi peran *big data* di masa mendatang.

Evaluasi *website* Puslit dapat dilakukan dari sisi pengelola dan pengunjung/pengguna sehingga akan diperoleh evaluasi yang lebih komprehensif. Evaluasi dari sisi pengelola *website* Puslit adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai pemutakhiran data dan informasi mengalami kendala, khususnya terkait kecepatan atau waktu memutakhirkan, karena adanya masalah koordinasi. Masing-masing personel tim pengelola *website* Puslit memiliki tugas dan fungsi utama yang harus dipenuhi dan dijalankan di samping membagi kewajibannya untuk mengelola *website* Puslit. Membangun dan mengembangkan (fisik) *website* Puslit pada dasarnya tidak masuk dalam pos anggaran Puslit, namun pada Bidang Data dan Teknologi Informasi. Hal ini menjadikan ruang gerak untuk melakukan *improvement* dari *website* Puslit menghadapi tantangan. Kegiatan yang *do-able* oleh tim pengelola *website* Puslit adalah pada pemutakhiran data dan informasi serta sedikit upaya *beautififikasi* (Gambar 21).



**Tampilan versi Lama** **Tampilan versi Baru**  
**Gambar 21.** Perbedaan Tampilan *Website* Pusat Penelitian

- b. Beberapa fitur yang ada di *website* Puslit belum terisi atau terkelola karena belum adanya produk yang tersedia dan juga SDM yang mendukung. Namun secara riil, fitur itu telah tercantum pada *website* Puslit. Misalnya Kajian/Analisis, Agenda Puslit, maupun Hasil Survei. Sedangkan evaluasi dari sisi pengunjung/pengguna *website* Puslit dapat dilihat dari hasil *Google Analytics* dan *heat mapping*. Poin-poin dari hasil *Google Analytics* terhadap *website* Puslit adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah kunjungan ke *website* Puslit menunjukkan tren yang relatif konstan pada periode 01 Februari 2020 sampai dengan 01 Desember 2020, yaitu 337.261 orang atau 33.726 orang/bulan. Bulan Mei dan Juni mengalami penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis karena pada saat itu diberlakukan pembatasan akses data dan informasi dari luar ke dalam lingkungan DPR RI akibat pertimbangan situasi yang tidak kondusif (banyak terjadi demonstrasi massa) (Gambar 22).



Sumber: *Google Analytics*, 2020.

**Gambar 22.** Overview dari Pengunjung *Website* Pusat Penelitian

Akses pengunjung *website* Puslit 85,02% menggunakan *operating system* berupa Android (Tabel 11). Hal ini menunjukkan pengunjung/pengguna banyak menggunakan *mobile phone* ketika mengakses *website* Puslit. Oleh sebab itu, tampilan *website* Puslit yang diakses dari *mobile phone* harus menjadi pertimbangan penting ketika melakukan penyesuaian tampilan *website* secara umum.

- b. Apabila dilihat berdasarkan aliran pengunjung, maka produk Info Singkat relatif yang paling banyak dikunjungi, diikuti Profil Peneliti dan Seminar Nasional. Analisis aliran pengunjung yang sederhana ini masih perlu dikritisi kembali karena memungkinkan pengunjung sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu melalui *search engine* tanpa harus berkunjung ke *website* Puslit, seperti OJS pada produk Jurnal atau juga gencarnya informasi tambahan melalui media sosial yang dilakukan.

Sejalan dengan hasil evaluasi menggunakan *Google Analytics*, melalui metode *heat mapping* dengan durasi pengamatan dari 10 November 2020 sampai dengan 01 Desember 2020, memperlihatkan bagian yang sering diakses oleh pengunjung pada *website* Puslit ke produk Info Singkat, Seminar Nasional, Buku, Galeri Foto, dan menu *bar* (Tentang Puslit, Peneliti, dan Produk). Petunjuk ini memberikan gambaran kepada pengelola bahwa produk-produk *hot item* yang perlu dijaga pemutakhirannya, kualitas kontennya, dan visualisasi yang menarik.

**Tabel 11.** Karakteristik Pengunjung *Website* Pusat Penelitian Berdasarkan Lokasi dan Penggunaan *Operating System*

Country	Users	% Users	City	Users	% Users
1.  Indonesia	337,115	99.88%	1. Jakarta	330,638	97.87%
2.  United States	193	0.06%	2. Surabaya	1,128	0.33%
3.  Singapore	37	0.01%	3. Depok	588	0.17%
4. (not set)	22	0.01%	4. Bandung	493	0.15%
5.  Australia	18	0.01%	5. Makassar	337	0.10%
6.  China	17	0.01%	6. Medan	325	0.10%
7.  Malaysia	16	0.00%	7. Depok	308	0.09%
8.  United Kingdom	13	0.00%	8. Batam	252	0.07%
9.  Germany	12	0.00%	9. (not set)	233	0.07%
10.  Japan	12	0.00%	10. Semarang	229	0.07%

Operating System	Users	% Users
1. Android	4,291	85.02%
2. IOS	745	14.76%
3. (not set)	6	0.12%
4. Windows	4	0.08%
5. BlackBerry	1	0.02%

Sumber: *Google Analytics*, 2020.

Beberapa tantangan dan permasalahan yang ada harus diselesaikan

oleh tim pengelola *website* Puslit di tahun 2021, antara lain (1) pemutakhiran data dan informasi di *website* Puslit, khususnya menyangkut Hasil Diskusi, FGD, *Workshop*, Seminar, Agenda Puslit, Infografis, dan galeri Foto, (2) melanjutkan upaya untuk menghadirkan tampilan dan konten *website* Puslit berbahasa Inggris, (3) penyebaran informasi lebih masif melalui *social media*, (4) Berkoordinasi dengan tata usaha Puslit dan penerjemah produk Info Singkat sehingga penerbitan Info Singkat berbahasa Inggris tidak terhambat, (5) mengintensifkan *Google Analytics* untuk mengevaluasi *website* Puslit secara berkala, (6) Merekrutan personel untuk membantu pengelolaan *website* Puslit, baik melalui Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan/atau mahasiswa magang, dan (7) peningkatan *image branding* Puslit melalui *website* serta transformasi tugas dan fungsi tim pengelolaan *website* Puslit ke tahap pengembangan big data dan parlemen modern.

## **9. Workshop, Diskusi Internal, dan Seminar Nasional**

Selain melakukan kegiatan penelitian, penerbitan karya tulis ilmiah dalam bentuk Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, dan kegiatan survei, Puslit juga melakukan *workshop*, diskusi internal, dan seminar nasional. Penyelenggaraan berbagai kegiatan ilmiah ini penting dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan dalam menganalisis data dan informasi, serta penerbitan karya tulis ilmiah. Sedangkan penyelenggaraan seminar nasional merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu terkini dari berbagai perspektif sekaligus mengembangkan *networking*.

Namun sejak pandemi Covid-19 di bulan Maret, berbagai *workshop*, diskusi, dan seminar dilakukan secara virtual. Selama tahun 2020 Puslit telah menyelenggarakan 10 kali *web seminar (webinar)* nasional, yaitu (a) Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Normal Baru tanggal 29 Mei 2020, (b) Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan Pada Era New Normal

tanggal 28 Juli 2020, (c) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Banten: Implementasi dan Dampaknya pada 30 September 2020, (d) Urgensi Hasil Penelitian dalam Pembentukan Undang-Undang pada 3 November 2020, (e) Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan pada 18 November 2020, (f) Implementasi Big Data Dalam Mendukung Parlemen Modern pada 20 November 2020, (g) Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Penguatan Fiskal Nasional pada 25 November 2020, (h) Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Pandemi Covid-19 pada 10 Desember 2020, (i) Menentukan Arah Kebijakan Daerah Berbasis Riset pada 16 Desember 2020, dan (j) Urgensi Pembentukan RUU Kalimantan Barat pada 18 Desember 2020. Selain kegiatan seminar, Puslit juga rutin melaksanakan diskusi internal selama tahun 2020 dalam rangka penerbitan KTI, penelitian, memperluas wawasan, serta meningkatkan kompetensi para peneliti.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan *webinar* nasional, antara lain (1) ketergantungan pada stabilitas jaringan internet, (2) menentukan ruang operasional untuk pelaksanaan kegiatan dengan jaringan yang stabil, pencahayaan yang baik, serta suara yang jernih tidak menggema, (3) koordinasi dengan narasumber yang tidak berada dalam ruangan/lokasi yang sama, (4) pertanyaan atau diskusi sulit dilakukan secara interaktif antara peserta dengan narasumber, dan (5) pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan menjelang akhir tahun anggaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan web seminar nasional apabila akan dilaksanakan kembali di tahun 2021, yaitu (1) tema seminar disesuaikan dengan kebutuhan DPR RI, (2) berkoordinasi secara matang dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan, (3) adanya simulasi acara sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan terpenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan, (4) peningkatan diversifikasi promosi acara melalui

media sosial, dan (5) tidak menumpuk dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran. Berbagai contoh pelaksanaan kegiatan *webinar* terangkum dalam Gambar 22.



**Gambar 23.** Kegiatan *Webinar* Pusat Penelitian yang Bekerja Sama dengan Berbagai Kalangan

## 10. Quick Wins

Sejak Oktober 2019, Puslit ditugasi oleh Ketua DPR RI untuk membuat sebuah *info brief* pada setiap akhir pekan yang berisi mengenai analisis singkat terhadap program atau kebijakan Pemerintah yang perlu mendapat perhatian DPR RI. Analisis singkat tersebut berisi program atau kebijakan yang perlu dikritisi, kaitannya dengan pelaksanaan fungsi DPR RI, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan, dan atensi ke depan yang perlu dilakukan oleh DPR RI. Analisis ini dikenal dengan Isu Sepekan, yang terdiri dari lima analisis berasal dari lima bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, sosial, dan hubungan internasional yang disajikan secara rutin tiap minggu.

Isu Sepekan ini dipilih untuk menjadi *Quick Wins* Puslit tahun 2020. Ketersediaan Isu Sepekan ini menjadi bagian dari tugas Puslit yang dilakukan oleh para peneliti dalam menyajikan informasi dengan cakupan yang lebih luas bagi DPR RI dalam bentuk yang simpel namun tetap substantif dan analitis. Dalam rangka memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas Isu Sepekan maka dilakukan langkah-langkah seperti pada Gambar 24.



## Gambar 24. Aliran Pengelolaan Naskah pada Isu Sepekan

Pedoman penulisan Isu Sepekan diperlukan sebagai acuan bagi penulis, agar hasil analisis singkat disajikan dalam format yang simpel dengan tampilan yang menarik, mudah dipahami serta informatif. Sementara itu, SOP disusun untuk setiap tahapan mulai dari penugasan, pengerjaan, koreksi, revisi, pendistribusian, sampai kepada penyimpanan Isu Sepekan. Kegiatan diseminasi penting untuk mengenalkan produk Isu Sepekan ini kepada Anggota DPR RI. Isu Sepekan sudah disampaikan secara rutin kepada 5 pimpinan DPR RI. Untuk memperluas cakupan Isu Sepekan, ke depannya tidak hanya jajaran Pimpinan DPR RI yang menerima Isu Sepekan, namun semua pimpinan AKD dan juga semua Anggota DPR RI diharapkan dapat menerima analisis singkat ini. Oleh karena itu, mulai tahun 2021, Isu Sepekan direncanakan sudah dapat dilihat di media sosial Instagram dan *website* Puslit.



**Gambar 25.** Isu Sepekan dan *Feed Back* dari Pimpinan DRP RI

Untuk meningkatkan kualitas Isu Sepekan, maka peningkatan kompetensi bagi tim redaksi Isu Sepekan, penulis, dan *layouter* sangat diperlukan untuk menghasilkan produk Isu Sepekan yang berkualitas secara substansi dan menarik secara tampilan. Oleh karena itu pada awal tahun 2021 Puslit akan mengadakan pelatihan secara virtual untuk semua peneliti tentang penulisan *policy brief* yang baik. Dengan demikian diharapkan secara substansi kualitas Isu Sepekan bisa lebih baik dan informatif, dan secara tampilan bisa lebih menarik untuk dibaca.

Lebih lanjut, untuk mendukung program *Quick Wins* diperlukan sarana dan prasarana yang memadai baik berupa fisik maupun nonfisik. Sarana dan prasarana fisik antara lain: *laptop/PC*, *printer*, dan ATK. Sedangkan sarana dan prasarana nonfisik berupa *software* untuk *template* yang lebih baik; akses ke surat kabar *online*; dan bank data dari *stakeholders* terkait sebagai bahan pendukung penulisan Isu Sepekan, misalnya data statistik dari BPS atau kementerian lain yang terkait dengan isu yang akan dikaji dan dijadikan produk Isu Sepekan oleh masing-masing bidang. Oleh karena itu, Puslit ke depannya dapat bekerja sama dengan institusi lain baik itu lembaga pemerintahan maupun media yang kompeten untuk mendukung penyiapan bank data yang diperlukan sekaligus dalam upaya penyiapan *big data* bagi DPR RI. Isu Sepekan diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berkualitas secara keilmuan hingga dapat dijadikan rujukan dan/atau sumber informasi bagi Pimpinan DPR, Pimpinan AKD, dan Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Beberapa kendala dan tantangan masih dihadapi dalam penerbitan isu sepekan ini, antara lain (1) dari segi tampilan, *template* Isu Sepekan baru dibuat dan diujicobakan. Masih ada beberapa perbaikan baik dalam hal warna tiap bidang yang berbeda maupun format, (2) dari segi substansi, pemilihan isu yang dianggap aktual pada minggu yang bersangkutan menjadi penting, dan (3) dari segi kedalaman materi, Isu Sepekan berbeda dengan produk kajian Puslit lainnya. Isu Sepekan yang berisi analisis yang padat dan ringkas tetapi tetap analitis. Kontributor Isu Sepekan adalah dari para peneliti Puslit yang memiliki kualifikasi beragam, baik dari latar belakang pendidikan maupun jenjang kepangkatan dan jabatan, yang terbiasa menggunakan pendekatan penyajian tulisan secara ilmiah. Oleh karena itu, menjadi tantangan dan dibutuhkan keterampilan tersendiri bagi para penulis untuk menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk yang simpel serta informatif namun dapat dipahami dengan baik oleh Anggota DPR RI.

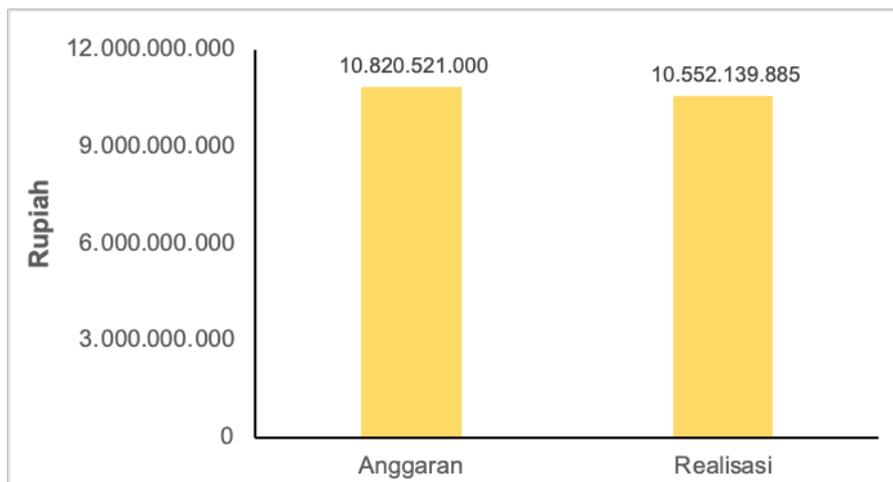
### C. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran tahun 2020 setelah mengalami *refocusing* dan revisi adalah sebesar Rp10.820.521.000 (Sepuluh miliar delapan ratus dua puluh jutua lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 97,52% atau senilai Rp10.552.139.885 (Sepuluh miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Anggaran ini digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan. Detail dapat dilihat pafa Tabel 12 dan Gambar 25.

**Tabel 12. Anggaran Pusat Penelitian Tahun 2020**

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
10.820.521.000	10.552.139.885	97,52

Sumber: Puslit, 2020.

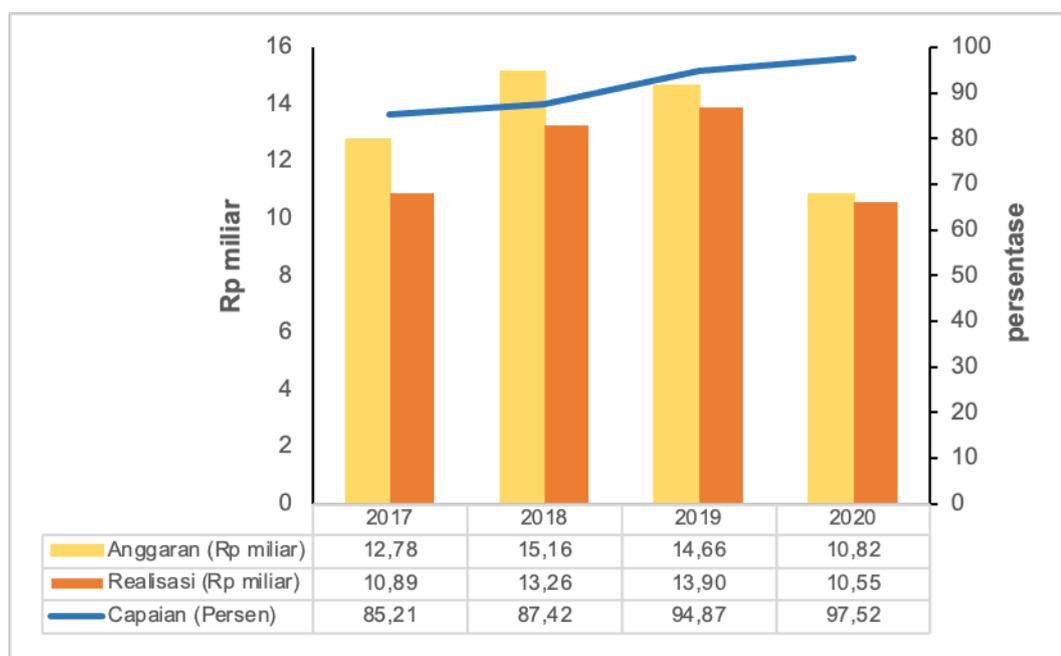


Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 26.** Realisasi Anggaran Pusat Penelitian Tahun 2020

Selanjutnya, pada Gambar 26 memperlihatkan perbandingan anggaran Puslit selama empat tahun terakhir (tahun 2017 hingga 2020). Pada tahun 2020 anggaran Puslit mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sekitar 26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan bahkan menurun sebesar 28,6% apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan bila dilihat dari segi realisasinya, realisasi anggaran Puslit selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2020 realisasi anggaran Puslit mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun anggarannya mengalami pengurangan yang cukup signifikan namun kegiatan Puslit tetap bisa berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, bahkan beberapa tugas tambahan dari Dewan yang tidak dianggarkan sebelumnya, seperti Isu Sepekan dan *Web Seminar*, dapat dilaksanakan.



Sumber: Puslit, 2020.

**Gambar 27.** Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020

Rincian besaran anggaran yang digunakan pada masing-masing indikator kinerja dijelaskan berikut:

**Indikator Kinerja 1:** Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, parliamentary Review, Prosiding Seminar yang dipublikasikan

Indikator kinerja *pertama* adalah hasil kegiatan berupa Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, Prosiding Seminar yang dipublikasikan, di mana Puslit menargetkan pencapaian *output* sebesar 100%. Detailnya dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13.** Anggaran Indikator Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, Prosiding Seminar yang Dipublikasikan Tahun 2020

Rincian	Kegiatan dalam DIPA	Rencana (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)	
Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , Prosiding Seminar yang dipublikasikan	A.	Kegiatan pendukung dan penerbitan karya tulis ilmiah	3.055.828.000	2.983.791.400	97,64
	B.	Kegiatan internal Pusat Penelitian	246.466.000	245.766.000	99,72
	C.	Kegiatan kepakaran peneliti	378.182.00	376.860.000	99,65
	D.	Kegiatan diskusi dalam rangka penerbitan karya tulis ilmiah	269.266.000	267.365.000	99,29
	E.	Kegiatan penelitian lainnya dalam rangka pemenuhan permintaan dewan	1.914.760.000	1.840.328.247	96,11
	F.	Kegiatan kelompok dalam pengkajian/penelitian/pengembangan data dan informasi/lintas kepakaran	2.699.661.000	2.675.289.063	99,10
	G.	Kegiatan survei	102.200.000	67.250.000	65,80
<b>Total</b>		<b>8.666.363.000</b>	<b>8.456.649.710</b>	<b>97,58</b>	

Sumber: Puslit, 2020.

Anggaran hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, Prosiding Seminar yang dipublikasikan ditargetkan sebesar Rp8.666.363.000 dan terealisasi sebesar 97,58%, di mana realisasi ini

hampir mencapai realisasi maksimal. Bila dilihat dari kegiatannya, rata-rata memiliki tingkat serapan yang tinggi, kecuali pada kegiatan survei. Hal tersebut disebabkan oleh anggaran survei hanya dialokasikan untuk honor, sedangkan anggota tim banyak yang terkena matriks pembatasan jumlah tim kerja sehingga tidak bisa menerima honor tersebut. Kegiatan dengan serapan anggaran tertinggi adalah kegiatan internal Puslit dengan serapan anggaran kegiatan mencapai 99,72%. Bila dilihat dari segi nominal, kegiatan yang memiliki anggaran paling besar adalah kegiatan pendukung dan penerbitan karya tulis ilmiah.

#### Indikator Kinerja 2: Jumlah dokumen administrasi Pusat Penelitian

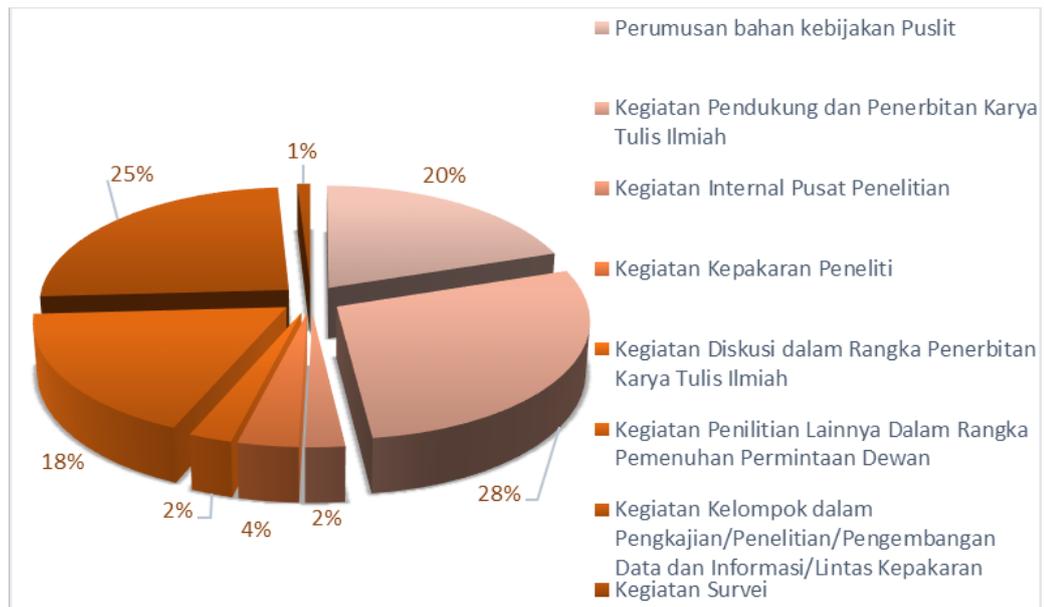
Jumlah dokumen administrasi Puslit merupakan indikator kinerja kedua dari sasaran program/kegiatan Puslit. Indikator kinerja ini menargetkan *output* sebanyak 4 dokumen. Dokumen tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Tabel 14 dengan *output* berupa rencana kegiatan Puslit, rencana keuangan Puslit, laporan pertanggungjawaban Puslit, serta laporan kinerja Puslit.

**Tabel 14.** Anggaran Dokumen Administrasi Pusat Penelitian Tahun 2020

Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Rincian	Kegiatan dalam DIPA	Rencana (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
4	4	1. Rencana Kegiatan Puslit 2. Rencana Keuangan Puslit 3. Laporan Pertanggungjawaban Puslit 4. Laporan Kinerja Puslit	Perumusan bahan kebijakan Puslit	2.154.158.000	2.095.490.175	97,28
<b>Total</b>				<b>2.154.158.000</b>	<b>2.095.490.175</b>	<b>97,28</b>

Sumber: Puslit, 2020

Pada Tabel 14. terlihat bahwa dari empat dokumen yang ditargetkan telah terealisasi seluruhnya. Dan penyerapan anggaran untuk kegiatan ini mencapai sebesar 97,28% dari yang dianggarkan. Komposisi anggaran masing-masing kelompok kegiatan di Puslit dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: Puslit, 2020

**Gambar 28.** Komposisi Anggaran Kegiatan Pusat Penelitian Tahun 2020

## BAB IV. PENUTUP

### Poin-poin esensial dan harapan

Tahun 2020 adalah tahun yang berat tidak hanya bagi bangsa dan negara Indonesia, akan tetapi juga dunia. Hampir semua sektor di negara ini terdampak bencana Pandemi Covid-19 tidak terkecuali sektor ekonomi. Hal ini tentunya berdampak pula pada pelaksanaan kegiatan di Instansi-instansi pemerintah termasuk Setjen DPR RI. Puslit sebagai salah satu pusat dalam Setjen DPR RI juga merasakan dampaknya diantaranya melalui pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 17%. Meskipun demikian Puslit tetap mampu mempertahankan kinerjanya dan melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Meskipun dalam kondisi darurat pandemi, anggaran dikurangi sebanyak dua kali, capaian kinerja puslit tetap bisa mencapai 100%.

**Tabel 15.** Realisasi Kegiatan dan Anggaran Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2020

Kegiatan	Rencana	Realisasi	Capaian
<b>Kegiatan 1.</b> Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , Prosiding Seminar yang dipublikasikan.	100%	100%	100%
<b>Anggaran</b>	Rp8.666.363.000	Rp8.456.649.710	97,58%
<b>Kegiatan 2.</b> <b>Jumlah dokumen administrasi Puslit</b>	4 dokumen	4 dokumen	100%
<b>Anggaran</b>	Rp2.154.158.000	Rp2.095.490.175	97,28%

Sumber: Puslit, 2020.

Laporan kinerja Puslit merupakan bentuk pertanggungjawaban Puslit sebagai organisasi baik berupa pertanggungjawaban kegiatan maupun

keuangan/anggaran. Sampai dengan Desember 2020 Puslit telah memenuhi target yang ditetapkan melalui upaya dari segenap unsur fungsional dan struktural yang terdapat di dalamnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Adapun target dan realisasi kinerja kegiatan dan anggaran Puslit dapat dilihat pada Tabel 15.

Dari tahun ke tahun capaian realisasi anggaran Puslit selalu mengalami peningkatan termasuk di tahun 2020, di mana realisasi anggaran Puslit mengalami kenaikan sebesar 2,80% dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran puslit selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 16. Dan realisasi kegiatan Puslit tetap 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun ini anggarannya berkurang dari segi nominal, namun hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan di lingkungan Puslit.

**Tabel 15.** Realisasi Anggaran Anggaran Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
2017	12.780.493.000	10.889.930.248	85,21
2018	15.162.558.000	13.255.218.310	87,42
2019	14.656.277.000	13.904.082.976	94,87
2020	10.820.521.000	10.552.139.885	97,52

Sumber: Puslit, 2020.

Meskipun secara kuantitatif realisasi kegiatan dan anggaran Puslit cukup memuaskan, akan tetapi secara kualitas masih terdapat beberapa kendala dari segi sarana dan prasana maupun SDM. Beberapa kendala yang memengaruhi kualitas kinerja organisasi ini juga perlu diatasi, antara lain (1) ketersediaan ruang kerja serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan penambahan jumlah peneliti, (2) kurangnya akses ke jurnal *online* berbayar dan akses

terhadap lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian, (3) belum adanya *data base* berisi data dan informasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan sebagai bahan kajian peneliti serta sistem kerja yang masih kurang tertata, dan (4) kurangnya dukungan dari segi anggaran maupun kegiatan guna peningkatan kapasitas dan kualitas *skill* dan keilmuan peneliti di lingkungan Puslit.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh Puslit untuk mengatasi kendala tersebut adalah (1) meningkatkan kualitas dan kompetensi peneliti melalui program-program pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun informal, (2) mengupayakan ketersediaan akses terhadap data dan informasi yang lebih luas untuk mendukung kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian dan pengkajian, (3) mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas peneliti dalam memberikan dukungan keahlian, baik kepada AKD maupun unit-unit lain di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan (3) mengoptimalkan peran dan fungsi peneliti dalam memberikan bantuan keahlian dengan memperbaiki sistem dan mekanisme kerja peneliti, baik di dalam maupun di luar Puslit.

Laporan kinerja ini sesungguhnya merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang dimiliki Puslit untuk melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditargetkan. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi agar kinerja Puslit lebih baik di tahun berikutnya. Melalui laporan kinerja ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dapat melihat potensi dan kendala yang dimiliki Puslit untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja Puslit di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Jurnal Utama Kebijakan Tahun 2020 Dokumen-dokumen tambahan 1. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP) yang penting

No.	Judul	Penulis
<b>Vol. 11, No. 1, Juni 2020</b>		
1.	Dampak Demokrasi terhadap Perdagangan di Negara-Negara Berpendapatan Menengah dan Tinggi Asia	Nathania Riris Michico Tambunan
2.	Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia	Rais Agil Bahtiar
3.	Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan	Andre Notohamijoyo, Martani Husein, Raldi H. Koestoer, Syafri Fauzi
4.	<i>The Determinants of Paddy Fields Conversion in Java and Sumatra</i>	Lusia Tri Harjanti dan Yonosuke Hara
5.	Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia	Sahrul Paipan, Muhammad Abrar
6.	Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung	Mandala Harefa
<b>Vol. 11, No. 2, Desember 2020</b>		
1.	RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan sebagai Strategi Peningkatan Ekspor	Edy Can dan Fithra Faisal Hastiadi
2.	Penerapan Kebijakan Nontarif dan Keterbukaan Ekonomi pada Perdagangan Intra-Industri Sektor Manufaktur Indonesia ke ASEAN	Nirma Rinastia dan Diah Wahyuningsih
3.	<i>FDI and Indonesia's Bilateral Intra-Industry Trade with Japan, China, and ASEAN-9</i>	Marisa Suhaila dan Masaru Ichihashi
4.	Pengaruh Aglomerasi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2005, 2010, dan 2015	Christiana Ari Sabatina
5.	Jumlah Permintaan Transjakarta terhadap Keberadaan <i>Mass Rapid Transit</i> di Provinsi DKI Jakarta	Salafi Nugrahani dan Muhammad Halley Yudhistira
6.	Hubungan Kepadatan Koperasi dan Keputusan Mengakses Pembiayaan Koperasi	Nopitasari dan Dwini Handayani
7.	<i>Revitalization of Food Barns to Support Community and National Food Security</i>	Putri Wulansari dan Doli Witro

Sumber: Puslit, 2020.

## 2. Jurnal Politica

No	Judul Tulisan	Penulis
<b>Vol. 11, No. 1, Mei 2020</b>		
1.	Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara	Dian Herdiana
2.	Kebijakan Respons Indonesia terhadap Problematika Teroris-Kombatan Transnasional Pasca Bom Bali 2002	Ali Abdullah Wibisono
3.	Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme	Aryojati Ardipandanto
4.	Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh	Debora Sanur L.
5.	Sains sebagai Sumber Soft Power Indonesia	Ary Aprianto
6.	Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 dan 2014-2019)	Ahmad Budiman
<b>Vol. 11, No. 2, November 2020</b>		
1.	<i>Securitization on the Spread of COVID-19 in Indonesia</i>	Cornelia Clara Tifany
2.	<i>Nationalism Over Globalization Amidst COVID-19 Pandemic and Its Impact on Indonesia's Food Security</i>	Prawita Meidi Handayani
3.	<i>Assessing the Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014</i>	Lidya Christin Sinaga
4.	Potensi Ancaman Asimetris Pada Returnees Foreign Fighter di Indonesia	Taufik Akbar, Pujo Widodo, dan Syaiful Anwar
5.	Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional	Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno dan Reni Windiani
6.	<i>Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace</i>	Hendra Manurung

Sumber: Puslit, 2020.

### 3. Jurnal Negara Hukum

No	Judul Tulisan	Penulis
<b>Vol. 11, No. 1, Juni 2020</b>		
1.	Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara	Irfan Iryadi
2.	Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi Terhadap Pekerja Migran Indonesia	Dian Cahyaningrum
3.	Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca UU No. 30 Tahun 2014	Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady
4.	Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Agus Suntoro
5.	Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017	Marfuatul Latifah
6.	Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?	Puteri Hikmawati
<b>Vol. 11, No. 2, November 2020</b>		
1.	Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional	Bernhard Ruben Fritz Sumigar
2.	Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dalam RUU KUHP	Prianter Jaya Hairi
3.	<i>Double Track System</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas	Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf
4.	Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	Novianto Murti Hantoro
5.	Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif	R. Muhamad Ibnu Mazjah
6.	Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah	Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman
7.	Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Luthvi Febryka Nola
8.	Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia	Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, Citi Rahmati Serfiyani

Sumber: Puslit, 2020.

#### 4. Jurnal Aspirasi

No.	Judul Tulisan	Penulis
<b>Vol. 11, No. 1, Juni 2020</b>		
1.	Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta	Rohani Budi Prihatin
2.	Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar	Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi
3.	Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja	Sri Nurhayati Qodriyatun
4.	Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Lukman Nul Hakim
5.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen	Tri Rini Puji Lestari
6.	Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)	Junius Fernando S. Saragih
7.	Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia	Agus Widiarto
8.	<i>Ocean Grabbing</i> di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi	Anggalih Bayu Muh. Kamim
<b>Vol. 11 No. 2, Desember 2020</b>		
1.	Koordinasi Badan Penganggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi bencana di Kabupaten Purworejo	Vira Amalia Bakti dan Fadlurrahman
2.	Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini
3.	Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga	Rojaul Huda
4.	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata (Studi di Kota Surabaya)	Yulia Indahri
5.	Eksplorasi Sikap Pembaca terhadap Wacana Kebijakan Program Pendidikan Kejuruan Empat Tahun	Elga Indina
6.	Bencana Covid-19: Stresor bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia	Sulis Winurini
7.	Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah	Hartini Retnaningsih
8.	Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19	Anih Sri Suryani

Sumber: Puslit, 2020.

## Jurnal Kajian

No.	Judul Tulisan	Penulis
<b>Vol. 25, No. 1, Tahun 2020</b>		
1.	Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembuatan Perda	Aryojati
2.	Penegakan Hukum Kampanye Hitam ( <i>Black Campaign</i> ) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019	Denico Doly
3.	Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang	Juniar Laras Wanda Umagapi
4.	Pemanfaatan Forum Pariwisata ASEAN untuk Promosi Pariwisata Indonesia	Lisbet
5.	Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan dari Keberhasilan Program Kesehatan Ibu dan Anak	Tri Rini Puji Lestari
<b>Vol. 25, No. 2, Tahun 2020</b>		
1.	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2018 Terhadap Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Satria Ranga Putra
2.	<i>Building Synergy Between Indonesia's Traditional and Modern Retail Industries with E-Commerce</i>	Edmira Rivani, Eka Budiyanti, dan Sony Hendra Permana
3.	<i>Local Strongman</i> di Bangkalan: Kuasa Politik "Blater" dalam Demokrasi Lokal 2008-2018	Moh. Zainor Ridho
4.	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual di Provinsi Jawa Barat	Venti Eka Satya
5.	Dampak Pandemi Wabah <i>Corona Virus Disease (Covid) 19</i> dan <i>Lockdown</i> terhadap Kesehatan Mental: Sebuah Kajian Psikologi dan Agama	Lukman Nul Hakim
<b>Vol. 25, No. 3, Tahun 2020</b>		
1.	Aspek Politik Pemerintahan dari Rencana Pemindahan Ibukota Negara RI	Prayudi
2.	Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital	Trias Palupi Kurnianingrum
3.	Politik Hukum <i>Omnibus Law</i> Sektor Ketenagakerjaan	Luthvi Febryka Nola
4.	Analisis Proses Merger Bank Syariah BUMN	Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati
5.	Hubungan <i>Psychological Capital</i> dan <i>Workplace Wellbeing</i> pada Pegawai Negeri Sipil	Sulis Winurini
<b>Vol. 25, No. 4, Tahun 2020</b>		
1.	Kampanye Daring dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19	Debora Sanur
2.	Dampak Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Ari Muliarta Ginting
3.	Efek Perjanjian Perdagangan Internasional terhadap Kegiatan Perdagangan dan Investasi: Kasus Indonesia	Rasbin
4.	Penegakkan Hukum Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene pada Kendaraan Bermotor	Denico Doly
5.	Peluang dan Tantangan <i>Esports</i> dalam Keolahragaan Nasional	Dinar Wahyuni

Sumber: Puslit, 2020.

## Lampiran 2. Buku Terbitan Tahun 2020

I. Buku Tim Hubungan Internasional (Total 4 Buku)				
No.	Nama Penulis/ Koordinator	Judul Buku	Penerbit	Jenis Buku
1.	Prof. Partogi	Diplomasi Parlemen	Yayasan Obor	Individu
2.	Prof. Partogi	Ancaman dan Tantangan Keamanan Abad 21	Yayasan Obor	Individu
3.	Prof. Partogi	Konflik Internal dan Kompleksitas Proxy War di Timur Tengah	Yayasan Obor	Individu
4.	Humprey Wangke	Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia	Yayasan Obor	Tim
5.	Prof. Partogi	Poros Maritim	Yayasan Obor	Individu
II. Buku Tim Ekonomi Kebijakan Publik (Total 6 Buku)				
No.	Nama Penulis/ Koordinator	Judul Buku	Penerbit	Jenis Buku
1.	Hilma Meilani	Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek	Yayasan Obor	Tim
2.	T. Ade Surya	Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia	Yayasan Obor	Tim
3.	Achmad Sani Alhusain	Memajukan Logistik Indonesia	Yayasan Obor	Tim
4.	Venty Eka Satya	Perangkap Kekayaan Alam Negara: Pengelolaan Penerimaan Dan Kekayaan Negara Indonesia Di Masa Depan	Yayasan Obor	Tim
5.	Ariesy Tri Mauleny	Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia	Yayasan Obor	Tambahan
6.	Rafika Sari	Tantangan Pembangunan Ekonomi Koridor Kedua Era Presiden Joko Widodo	Yayasan Obor	Tambahan
III. Buku Tim Politik Dalam Negeri (Total Ada 3 Buku)				
No.	Nama Penulis/ Koordinator	Judul Buku	Penerbit	Jenis Buku
1.	Prayudi	Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah	Yayasan Obor	Tim
2.	Ahmad Budiman	Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya	Intrans	Tim
3.	Riris Katharina	Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia	Yayasan Obor	Tim
IV. Buku Tim Hukum (Total 2 Buku)				
No.	Nama Penulis/ Koordinator	Judul Buku	Penerbit	Jenis Buku
1.	Lidya Suryani Widayati	Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi	Yayasan Obor	Tim
2.	Puteri Hikmawati	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun	Yayasan Obor	Tim

		2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan		
<b>V. Buku Tim Kesejahteraan Sosial (Total 6 Buku)</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Penulis/ Koordinator</b>	<b>Judul Buku</b>	<b>Penerbit</b>	<b>Jenis Buku</b>
1.	Yulia Indahri	Sekolah Menengah Atas	Intrans	Individu
2.	Achmad Muchaddam F.	Pengelolaan Zakat di Indonesia	Intrans	Individu
3.	Mohamad Mulyadi	Riset Kualitatif	Intrans	Individu
4.	Hartini Retnaningsih	Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja	Intrans	Individu
5.	Ujiyanto Singgih	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Intrans	Tim
6.	Rohani Budi	Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Perspektif Sosiologis	Intrans	Tim

Sumber: Puslit, 2020.

### Lampiran 3. Laporan Penelitian Kelompok dan AKD Tahun 2020

#### 1. Laporan Penelitian Kelompok Tahun 2020

Bidang	No.	Keanggotan Tim	Judul
Hukum	1.	Ketua: Puteri Hikmawati Anggota: 1. Lidya Suryani Widayati 2. Shanti Dwi Kartika 3. Noverdi Puja Saputra	Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana
	2.	Ketua: Novianti Anggota: 1. Dian Cahyaningrum 2. Luthvi Febrika Nola 3. Trias Palupi Kurnianingrum	Pelindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional
	3.	Ketua: Denico Doly Anggota: 1. Monika Suhayati 2. Harris Y.P. Sibuea 3. Prianter Jaya Hairi	Penegakan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Upaya Pencegahan Covid-19
	4.	Ketua: Novianto Murti Hantoro Anggota: 1. Sulasi Rongiyati 2. Marfuatul Latifah 3. Yosephus Mainake	Urgensi Pembentukan RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan
PDN	5.	Ketua: Ahmad Budiman Anggota: 1. Aryojati Ardipandanto 2. Siti Chaerani D. 3. Aulia Fitria	Membangun Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara ( <i>Minimum Essential Force</i> TNI) di Era New Normal
	6.	Ketua: Dewi Sendhikasari Anggota: 1. Riris Katharina 2. Sidiq Budi Sejati 3. Anin Dhita Kiky Amrynudin	Tata Kelola Pemerintahan di Era New Normal: Respons Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19
	7.	Ketua: Prayudi Anggota: 1. Debora Sanur Lindawaty 2. Juniar Laraswanda Umagapi 3. Aryo Wasisto	Relevansi Pilkada Serentak dalam Skema Keserentakan Pemilu Nasional
KS	8.	Ketua: Sali Susiana Anggota: 1. Tri Rini Puji Lestari 2. Hartini Retnaningsih	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanganan Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat)
	9.	Ketua: Achmad Muchaddam F Anggota: 1. Yulia Indahri 2. Elga Andina 3. Fieka Nurul Arifa	Respons PTKIN terhadap Kebijakan Kampus Merdeka Studi Kasus UIN Bandung dan UIN Serang
	10.	Ketua: Lukman Nul Hakim Anggota: 1. Mohammad Mulyadi 2. Rohani Budi Prihatin 3. Ujiyanto Singgih P.	Respon Pendanaan Instusi Pendidikan di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Ambon Provinsi Maluku)

Bidang	No.	Keanggotaan Tim	Judul
	11.	Ketua: Teddy Prasetiawan Anggota: 1. Sri Nurhayati Q. 2. Anih Sri Suryani 3. Mohammad Teja	Adaptasi Baru Pengelolaan Sampah Pasca Pandemi Covid-19
	12.	Ketua: Dinar Wahyuni Anggota: 1. Sulis Winurini 2. Rahmi Yuningsih 3. Nur Sholikhah Putri Suni	Upaya Pemulihan Pariwisata di Era New Normal
HI	13.	Ketua: Humphrey Wangke Anggota: 1. Siyad Falahi 2. Adirini Pujayanti.	Diplomasi Digital Dalam Politik Luar Negeri Indonesia
	14.	Ketua: Simela Victor Muhamad Anggota: 1. Poltak Partogi Nainggolan 2. Rizki Roza 3. Lisbet 4. Sita Hidriyah	Kerja Sama Indo-Pasifik: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia
EKP	15.	Ketua: Iwan Hermawan Anggota: 1. Yuni Sudarwati 2. Rafika Sari Panjaitan 3. Izzaty 4. Dewi Wuryandani	Strategi Pengembangan <i>Start-Up</i> Pertanian dalam Mendukung Logistik Pangan Nasional
	16.	Ketua: Hariyadi Anggota: 1. Sony Hendra Permana 2. Masyithah Aulia Adhiem 3. Burhanudin Mukhamad Faturahman	Tata Kelola Penyediaan Listrik Berbasis Surya Studi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah
	17.	Ketua: Juli Panglima Saragih Anggota: 1. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 2. Eka Budiyantri 3. T. Ade Surya	Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19
	18.	Ketua: Mandala Harefa Anggota: 1. Hilma Meilani 2. Niken Paramita Purwanto 3. Dewi Restu Mangeswuri 4. Rais Agil Bahtiar	Permasalahan dan Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Pandemi Covid-19
	19	Ketua: Rasbin Anggota: 1. Ari Muliarta Ginting 2. Edmira Rivani 3. Venti Eka Satya	Analisis Kebijakan Sumber-Sumber Baru Penerimaan Asli Daerah: Integrasi dengan Sektor Pariwisata
	20	Ketua: Ariesy T. M. Anggota: 1. Sani 2. Nidya 3. Lisna	Prospek Pengembangan Industri Keuangan Syariah

Sumber: Puslit, 2020.

## 2. Laporan Penelitian Berdasarkan Permintaan AKD Tahun 2020

No.	Anggota	Judul
1.	Ketua: Riris Katharina Anggota: 1. Dewi Sendhikasari 2. Anin Dhita Kiky Amryudin 3. Sidiq Budi Sejati 4. Burhanudin Mukhamad Faturahman 5. Rais Agil Bahtiar	Implikasi Penghapusan Eselon III dan IV terhadap Pelayanan Publik di Indonesia
2.	Ketua: Prayudi Anggota: 1. Debora Sanur Lindawaty 2. Aryo Wasisto 3. Juniar Laraswanda Umagapi 4. Novianto M. Hantoro	Evaluasi Skema Serentak Pemilu 2019: Menciptakan Desain Pemilu yang Efektif dan Kondusif
3.	Ketua: Ujianto Singgih Prayitno Anggota: 1. Sali Susiana 2. Lukman Nul Hakim 3. Anih Sri Suryani. 4. Dian Cahyaningrum. 5. Sony Hendra Permana	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Coorporate Social Responsibility</i> ), Studi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Ketua: Tri Rini Puji Lestari Anggota 1. Hartini Retnaningsih 2. Rahmi Yuningsih 3. Nur Sholikah Putri Suni 4. Yosephus Mainake	Kerja sama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan: Studi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Ketua: Yulia Indahri Anggota 1. Achmad Muchaddam Fahham 2. Elga Andina 3. Fieka Nurul Arifa 4. Sulis Winurini 5. Shanti Dwi Kartika	Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
6.	Ketua: Lidya Suryani Anggota: 1. Puteri Hikmawati 2. Marfuatul Latifah 3. Prianter Jaya Hairi 4. Noverdi Puja Saputra	Politik Hukum Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7.	Ketua: Trias Palupi Kurnianingrum Anggota: 1. Luthvi Febryka Nola 2. Ahmad Budiman 3. Aryojati Ardipandanto 4. Siti Chaerani Dewanti	Optimalisasi Pelindungan terhadap Pengelolaan Data Pribadi di Indonesia
8.	Ketua: Humphrey Wangke Anggota: 1. Ziyadh Fallahi 2. Novianti 3. Harris Y. P. Sibuea 4. Rasbin 5. Dinar Wahyuni	Optimalisasi Perjanjian Perdagangan Internasional
9.	Ketua: Poltak Partogi Nainggolan Anggota: 1. Simela Victor Muhammad 2. Lisbet	Perspektif Hubungan Internasional dan Pertahanan-Keamanan Ibu Kota Negara (IKN) Baru

No.	Anggota	Judul
	3. Rizki Roza 4. Sita Hidriyah 5. Aulia Fitri	
10.	Ketua: Izzaty Anggota: 1. Iwan Hermawan 2. Yuni Sudarwati 3. Rafika Sari 4. Eka Budiyanti 5. Muhammad Teja	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
11.	Ketua: Sahat Aditua F. Silalahi Anggota: 1. Achmad Sani Alhusain 2. T. Ade Surya 3. Denico Doly 4. Mohammad Mulyadi 5. Teddy Prasetiawan	Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan dalam Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
12.	Ketua: Ari Mulianta Ginting Anggota: 1. Juli Panglima Saragih 2. Mandala Harefa 3. Hilma Meilani 4. Masyithah Aulia Adhiem 5. Monika Suhayati	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilir) Minyak dan Gas (Migas) dan Mineral
13.	Ketua: Hariyadi Anggota: 1. Dewi Restu Mangeswuri 2. Niken Paramita Purwanto 3. Dewi Wuryandani 4. Sri Nurhayati Qodriyatun 5. Rohani Budi Prihatin	Optimalisasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
14.	Ketua: Ariesy Tri Mauleny Anggota: 1. Nidya Waras Sayekti 2. Lisnawati 3. Edmira Rivani 4. Venti Eka Satya 5. Sulasi Rongiyati	Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Nasional

Sumber: Puslit, 2020.

## Lampiran 4. Info Singkat Terbitan Tahun 2020

No	Judul Tulisan	Penulis
<b>Vol. XII, No. 1//Puslit/Januari/2020</b>		
1.	Dampak Ekonomi dan Kebijakan Mitigasi Risiko Banjir di DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2020	Ari Mulianta Ginting
2.	Wacana Penerapan Sistem E-Rekap pada Pilkada Serentak Tahun 2020	Aryojati Ardipandanto
3.	Penegakkan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan	Denico Doly
4.	Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuta Utara	Humphry Wangke.
5.	Banjir dan Rusaknya Ekologi Perkotaan	Rohani Budi Prihatin
<b>Vol. XII, No. 2//Puslit/Januari/2020</b>		
1.	Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya	Luthvi Febryka Nola
2.	Pembunuhan Soleimani dan Eskalasi Konflik AS-Iran	Poltak Partogi Nainggolan
3.	Mencari Solusi atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020	Hartini Retnaningsih
4.	Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan	Nidya Waras Sayekti
5.	Penghapusan Status Tenaga Honoror dan Dampaknya	Dewi Sendhikasari Dharmaningtiast
<b>Vol. XII, No. 3//Puslit/Februari/2020</b>		
1.	Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional	Monika Suhayati
2.	Proposal Damai Amerika Serikat Mengenai Penyelesaian Konflik Israel-Palestina	Simela Victor Muhammad
3.	Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i>	Nur Sholikhah Putri Suni
4.	Penurunan Harga Gas dan Daya Saing Industri Nasional	Ariesy Tri Mauleny
5.	Pengawasan Layanan Siaran Video on Demand	Ahmad Budiman
<b>Vol. XII, No. 4//Puslit/Februari/2020</b>		
1.	Politik Hukum RUU Cipta Kerja	Shanti Dwi Kartika
2.	Perimbangan Kekuatan Pasca-Penghentian Kerja Sama Pertahanan Amerika Serikat-Filipina	Rizki Roza
3.	Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatant ISIS	Elga Andina
4.	Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia	Eka Budiyaniti
5.	Agenda Pilkada Serentak 2020 dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal	Prayudi
<b>Vol. XII, No. 5//Puslit/Maret/2020</b>		
1.	Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	Harris Yonatan Parmahan Sibuea
2.	Penyebaran Covid-19 dan Respons Internasional	Lisbet
3.	Kritik Terhadap Pasal 25 RUU tentang Ketahanan Keluarga dari Perspektif Gender	Sali Susiana
4.	Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi <i>Panic Buying</i> Akibat Covid-19	Izzaty
5.	Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19	Riris Katharina
<b>Vol. XII, No. 6//Puslit/Maret/2020</b>		
1.	Perumusan Sanksi Pidana dalam RUU tentang Cipta Kerja	Marfuatul Latifah
2.	Kunjungan Raja Willem-Alexander dan Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Belanda	Sita Hidriyah
3.	Ketahanan Air di Tengah Perubahan Iklim	Sri Nurhayati Qodriyatun

4.	Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM	Rais Agil Bahtiar Juli Panglima Saragih
5.	Wacana Kebijakan Lockdown dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia	Debora Sanur Lindawaty
<b>Vol. XII, No. 7/II/Puslit/April/2020</b>		
1.	Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19	Prianter Jaya Hairi
2.	Regionalisme ASEAN dalam Merespons Pandemi Covid-19	Ziyad Falahi Poltak Partogi Nainggolan
3.	Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Covid-19	Fieka Nurul Arifa
4.	Urgensi Stimulus Perpajakan Sektor Manufaktur Akibat Pandemi Covid-19	Rafika Sari
5.	Komunikasi Media yang Efektif pada Pandemi Covid-19	Handrini Ardiyanti
<b>Vol. XII, No. 8/II/Puslit/April/2020</b>		
1.	Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19	Trias Palupi Kurnianingrum
2.	Health Silk Road: Strategi China Mewujudkan Ambisi Geopolitiknya	Humphry Wangke
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19	Mohammad Mulyadi.
4.	Inkonsistensi dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19	T. Ade Surya.
5.	Tantangan Pelibatan TNI dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	Aulia Fitri
<b>Vol. XII, No. 9/II/Puslit/Mei/2020</b>		
1.	Penegakan Hukum Larangan Mudik pada Saat Pandemi Covid-19	Puteri Hikmawati
2.	Kontroversi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap WHO	Poltak Partogi Nainggolan
3.	Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia	Teddy Prasetiawan
4.	Penurunan Harga Minyak Mentah Dunia dan Implikasinya bagi Pertamina dan APBN	Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
5.	Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19	Anin Dhita Kiky Amryudin Riris Katharina
<b>Vol. XII, No. 10/III/Puslit/Mei/2020</b>		
1.	Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada	Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
2.	Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan dan Sikap ASEAN	Simela Victor Muhammad,
3.	Pelindungan Lanjut Usia pada Masa Pandemi Covid-19	Lukman Nul Hakim
4.	Upaya Pemerintah dalam Mengantisipasi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2020	Burhanudin Mukhamad Faturahman Mandala Harefa
5.	Peran Tim Pengawas dan Satuan Tugas DPR RI dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	Juniar Laraswanda Umagapi Debora Sanur Lindawaty
<b>Vol. XII, No. 11/II/Puslit/Juni/2020</b>		
1.	Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana dalam Pemberantasan Mafia Peradilan	Lidya Suryani Widayati
2.	Upaya Gencatan Senjata Global di Tengah Pandemi Covid-19	Rizki Roza
3.	Promosi Kesehatan pada Kehidupan New Normal Pandemi Covid-19	Rahmi Yuningsih
4.	Kesiapan Pelaku Ekonomi Menghadapi Kenormalan Baru	Iwan Hermawan
5.	Peran Lembaga Penyiaran Publik dalam Sosialisasi New Normal	Siti Chaerani Dewanti
<b>Vol. XII, No. 12/III/Puslit/Juni/2020</b>		
1.	Implikasi PP Penyelenggaraan Tapera dan PP Penyelenggaraan Program JHT terhadap Program	Novianti

	Perumahan bagi Pekerja Swasta	
2.	Munculnya Gelombang kedua Covid-19 dan Perlunya Peningkatan Kerja Sama Internasional	Lisbet
3.	Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi	Yulia Indahri
4.	Tekanan Anggaran Negara dalam Penanggulangan Dampak Covid-19	Rais Agil Bahtiar Hariyadi
5.	Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020	Aryo Wasisto Prayudi
<b>Vol. XII, No. 13//Puslit/Juli/2020</b>		
1.	Pengaturan Kemudahan Berusaha untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja	Sulasi Rongiyati
2.	Kebijakan Isolasi Korea Utara dan Prospek Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea	Sita Hidriyah
3.	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Lingkungan Global	Anih Sri Suryani
4.	Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Pandemi Covid-19	Venti Eka Satya
5.	Wacana Reshuffle dan Evaluasi Kinerja Kabinet dalam Penanganan Covid-19	Sidiq Budi Sejati Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
<b>Vol. XII, No. 14//Puslit/Juli/2020</b>		
1.	Persidangan secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19	Dian Cahyaningrum
2.	Tantangan China sebagai Negara Adidaya Baru	Ziyad Falahi Poltak Partogi Nainggolan
3.	Pembelajaran di Pesantren pada Masa Pandemi Covid-19	Achmad Muchaddam F.
4.	Skema Penyelamatan BUMN pada Masa Pandemi Covid-19	Lisnawati
5.	Persiapan KPU dalam Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020	Aryojati Ardipandanto
<b>Vol. XII, No. 15//Puslit/Agustus/2020</b>		
1.	Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan	Noverdi Puja Saputra Marfuatul Latifah
2.	Ketegangan Hubungan AS-China dan Dampaknya terhadap Indonesia	Humphry Wangke
3.	Permasalahan Kesehatan Mental Akibat Pandemi Covid-19	Sulis Winurini
4.	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya	Dewi Wuryandani
5.	Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Pandemi Covid-19	Handrini Ardiyanti
<b>Vol. XII, No. 16//Puslit/Agustus/2020</b>		
1.	Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Yosephus Mainake Luthvi Febryka Nola
2.	Erdogan dan Turki sebagai Kekuatan Baru di Timur Tengah	Poltak Partogi Nainggolan
3.	Uji Klinik Coronavac dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal di Indonesia	Rahmi Yuningsih
4.	RAPBN Tahun Anggaran 2021 untuk Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional	Hilma Meilani
5.	Potensi Stagnasi Politik di Tengah Harapan Pilkada 2020	Prayudi
<b>Vol. XII, No. 17//Puslit/September/2020</b>		
1.	Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Denico Doly Noverdi Puja Saputra
2.	Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Isu Palestina	Simela Victor Muhammad
3.	Polemik Esports dalam Keolahragaan Nasional	Dinar Wahyuni

4.	Bantuan Fiskal untuk UMKM pada Masa Pandemi Covid-19	Niken Paramita Purwanto
5.	Netralisasi Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada	Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
<b>Vol. XII, No. 18/III/Puslit/September/2020</b>		
1.	Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di masa Pandemi Covid-19	Luthvi Febryka Nola
2.	Respons ASEAN terhadap Peningkatan Rivalitas AS-China	Rizki Roza
3.	Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19	Mohammad Teja
4.	PSBB DKI Jakarta Jilid II dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional	Masyithah Aulia Adhiem
5.	Upaya Penerapan Protokol Kesehatan pada Pilkada Serentak 2020	Juniar Laraswanda Umagapi Aryo Wasisto
<b>Vol. XII, No. 19/III/Puslit/Oktober/2020</b>		
1.	Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi	Monika Suhayati Noverdi Puja Saputra
2.	Konflik Armenia dan Azerbaijan serta Upaya Damai Masyarakat Indonesia	Lisbet
3.	Batasan Usia dan Kesejahteraan Lansia	Lukman Nul Hakim
4.	Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ekonomi Indonesia	Sony Hendra Permana
5.	Kebijakan Kampanye secara Daring pada Pilkada Serentak 2020	Siti Chaerani Dewanti
<b>Vol. XII, No. 20/III/Puslit/Oktober/2020</b>		
1.	Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja	Shanti Dwi Kartika
2.	Demonstrasi Pro-Demokrasi di Thailand	Sita Hidriyah
3.	Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan	Anih Sri Suryani
4.	Surplus Neraca Perdagangan dan Harapan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19	Edmira Rivani
5.	Pelibatan Pihak Swasta dalam Industri Pertahanan Nasional pada Undang-undang Cipta Kerja	Aulia Fitri
<b>Vol. XII, No. 21/III/Puslit/November/2020</b>		
1.	Mempertimbangkan Mekanisme Perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Harris Yonatan Parmahan Sibuea
2.	Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 dan Implikasinya bagi Dunia	Poltak Partogi Nainggolan Simela Victor Muhammad
3.	Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Libur Panjang Oktober 2020 dan Upaya Penanggulangannya	Nur Sholikhah Putri Suni
4.	Dampak Penetapan Upah Minimum Provinsi 2021 di Tengah Pandemi Covid-19	Dewi Restu Mangeswuri
5.	Sinergitas Antarlembaga Pemerintah dalam Setahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin	Sidiq Budi Sejati Anin Dhita Kiky Amrynudin
<b>Vol. XII, No. 22/III/Puslit/November/2020</b>		
1.	Polemik Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia	Marfuatul Latifah Noverdi Puja Saputra
2.	Prospek Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dan Negara-Negara Indo-Pasifik	Humphry Wangke
3.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19	Dinar Wahyuni
4.	Peluang dan Strategi Peningkatan Ekspor Pasca Penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership	Achmad Sani Alhusain
5.	Efektivitas Debat Publik Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 dan Peran Lembaga Penyiaran	Ahmad Budiman
<b>Vol. XII, No. 23/III/Puslit/Desember/2020</b>		

1.	Urgensi Pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata	Prianter Jaya Hairi
2.	Sekulerisme Prancis dan Instabilitas Politik Global	Poltak Partogi Nainggolan
3.	PPPK Guru sebagai Pemenuhan Kekurangan Tenaga Pendidik	Fieka Nurul Arifa
4.	Restrukturisasi Kredit untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	Rasbin
5.	Kesiapan Aparat Pemerintah dalam Merespons Kerawanan Minggu Tenang Pilkada Serentak 2020	Debora Sanur Lindawaty
<b>Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020</b>		
1.	Perlindungan Data Pribadi: Dapatkah Hasil Test Swab Rizieq Shihab Dibuka?	Trias Palupi Kurniangrum
2.	Pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh dan Ketegangan di Kawasan Timur Tengah	Simela Victor Muhamad
3.	Kekeraan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19	Sali Susiana
4.	Pengembangan Industri Lobster Nasional	Yuni Sudarwati
5.	Peningkatan Jumlah Kepala Daerah Terinfeksi Covid-19 dan Pemerintahan Elektronik (E-Government)	Riris Katharina

Sumber: Puslit, 2020.

**Lampiran 5. Parliamentary Review Terbitan Tahun 2020**

Edisi	Judul	Penulis
<b>Vol. II, No. 1, Maret 2020 Topik utama: “Omnibus Law”</b>		
1.	Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia	Novianto Murti Hantoro
2.	Pembentukan Omnibus Law dalam Upaya Meningkatkan Investasi	Mandala Harefa dan Achmad Sani Alhusain
3.	Kesejahteraan Pekerja dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja	Hartini Retnaningsih
4.	Urgensi Omnibus Law Keamanan Laut	Poltak Partogi Nainggolan
5.	Pemilu sebagai Bagian dari Desain Penataan Sistem Politik yang Demokratis	Prayudi
<b>Vol. II, No. 2, Juni 2020 Topik utama: “Pemindahan Ibu Kota Negara”</b>		
1.	Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru	Riris Katharina
2.	Wewenang dan Kesiapan Regulasi Pembentukan Ibu Kota Negara	Sulasi Rongiyati
3.	Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19	Hariyadi
4.	Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi	Sri Nurhayati Qodriyatun
5.	Perspektif Hubungan Internasional Pemindahan Ibu Kota Indonesia	Poltak Partogi Nainggolan
<b>Vol. II, No. 3, September 2020 Topik utama: “Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”</b>		
1.	Upaya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19	Tri Rini Puji Lestari
2.	Mencegah Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19	Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa
3.	Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19	Dian Cahyaningrum dan Monika Suhayati
4.	Pengembangan Model Pelayanan Elektronik di Era New Normal	Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman
5.	Perlunya Multilateralisme dalam Mengatasi Pandemi Covid-19	Poltak Partogi Nainggolan
<b>Vol. II, No. 4, Desember 2020 Topik utama: “Otonomi Khusus Papua”</b>		
1.	Kebijakan bagi Papua di Masa Depan	Riris Khatarina
2.	Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Papua	Suhartono dan Venti Eka Satya
3.	Otonomi Khusus Papua dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan	Sali Susiana
4.	Papua dan Diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan	Simela Victor Muhamad

## Lampiran 6. Web Seminar Puslit pada Tahun 2020

No.	Tanggal	Judul/Tema	Pembicara
1.	29 Mei 2020	Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Normal Baru	<i>Keynote Speech:</i> Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Ketua Komisi II DPR RI) Prof. Dr. Eko Prasajo (Dekan FIA UI) Rini Widyantini, SH., MPM (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB) Moderator: Dr. Ari Sudjito (Doktor Sosiolog Fisipol UGM)
2.	28 Juli 2020	Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan pada Era New Normal	<i>Keynote Speech:</i> H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M (Ketua BURT DPR RI) Pembicara: Dr. Ir. Hetifah S (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) Dr. Iwan Syahril, PhD (Dirjen Guru dan Tendik Kemendikbud) Prof. Musa Hubeis (Guru Besar IPB) Najelaa Shihab (Pendidik) Moderator: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA (Peneliti Muda Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
3.	30 September 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Banten: Implementasi dan Dampaknya	<i>Keynote Speech:</i> Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si. (Wakil Ketua BURT dan Anggota Komisi III DPR RI) Pembicara: H. Samsir, SH, M.Si (Satgas Covid-19 Prov. Banten – Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Banten) Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq, SH., MH (Dekan FH Untirta) Prof. Dr. Muhammad Mulyadi, AP. M.Si. (Prof Riset Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI) Rinton M. Simarmata, S.H. (Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kadin Prov. Banten) Moderator: Dr. Rohani Budi Prihatin, M.Si. (Peneliti Madya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
4.	3 November 2020	Urgensi Hasil Penelitian dalam Pembentukan Undang-Undang	<i>Keynote Speech:</i> Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si. (Wakil Ketua BURT dan Anggota Komisi III DPR RI) Pembicara: Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H. (Guru Besar UPI) Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI) Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Peneliti Madya Puslit DPR RI) Moderator: Dr. Syaifullah, S.Pd., M.Si. (Dosen Program Studi PKn FPIPS UPI)
5.	18 November 2020	Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan	<i>Keynote Speech:</i> Dr. (H.C) Puan Maharani (Ketua DPR RI) Pembicara: Dr. H.M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Prof. Ari Kuncoro, PhD (Rektor Universitas Indonesia) Prof. Bambang P.S Brodjonegoro, PhD (Menristek/Kepala BRIN) Sri Mulyani, PhD (Menteri Keuangan RI) Moderator: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

			(Peneliti Madya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
6.	20 November 2020	Implementasi <i>Big Data</i> dalam Mendukung Parlemen Modern	<i>Keynote Speech:</i> H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M (Ketua BURT & Anggota Komisi II DPR RI) Pembicara: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI) Widyawan, S.T., M.Sc., PhD (Dosen Fakultas Teknik UGM) Dr. Mardhani Riassetiawan, SE. Ak., M.T. (Dosen FMIPA UGM) Dr. Arie Sujito, S.Sos.,M.Si (Dosen Fisipol UGM) Moderator: Teguh Bharata Adji, ST., M.T., M.Eng., Ph.D. (Dosen Fakultas Teknik UGM)
7.	25 November 2020	Web Seminar Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Penguatan Fiskal Nasional	Pembicara: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.SE (Peneliti Madya Puslit Setjen DPR RI) Eko Suwardi, M.Sc., Ph. D (Dekan FEB UGM) Prof. Dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., PhD (Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID 19, Kemenristek/BRIN dan Rektor Univ. Trisakti) Moderator: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. (Peneliti Madya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
8.	10 Desember 2020	Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dampak Pandemi COVID 19	<i>Keynote Speech:</i> Hj. Novita Wijayanti (Wakil Ketua BURT DPR RI) Pembicara: Rahmadi Murwanto (Direktur PKN STAN) Indah Kurnia (Anggota BURT DPR RI) Dr. Ariesy Tri Mauleny (Peneliti DPR RI) Moderator: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. (Peneliti Madya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
9.	16 Desember 2020	Menentukan Arah Kebijakan Daerah Berbasis Riset	<i>Keynote Speech:</i> Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II DPR RI) Pembicara: H. Agung Budi Santoso, SH., M.M. (Ketua BURT DPR RI) Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI) Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D. (Kaprosdi Pasca Administrasi Publik FISIP UNPAD) Moderator: Dr. Rohani Budi Prihatin, M.Si. (Peneliti Madya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
9.	18 Desember 2020	Urgensi Pembentukan RUU Kalimantan Barat	Pembicara: Prof. Dr. Garuda Wiko (Rektor Univ.Tanjungpura) Dr. Inosentius Samsul (Kepala Badan Keahlian DPR RI) Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman (Dekan FH Univ. Tanjungpura) Dr. H. Martoyo (Dekan FISIP Univ. Tanjungpura) Moderator: Dr. Jumaidi, S.Sos., M.Si. (Dosen FISIP Universitas Tanjungpura)

Sumber: Puslit, 2020.

## Lampiran 7. Beberapa Contoh Isu Sepekan Terbitan Tahun 2020

Waktu	Bidang	Penulis	Judul
Minggu ke 1 28 November s.d. 3 Desember	Hukum	Monika Suhayati	Aksi Terorisme di Kabupaten Sigi
	EKP	Rasbin	Kesinambungan Tingkat Ekspansif Industri Manufaktur
	PDN	Juniar Laraswanda Umagapi	Permasalahan Logistik Pilkada
	HI	Sita Hidriyah	Utang Negara Akibat Tekanan Ekonomi Dunia di Masa Pandemi C
	KS	Mohammad Mulyadi	Kasus Cor
Minggu ke 2 4 Desember s.d. 10 Desember	Hukum	Shanti Dwi Kartika	Korupsi di l
	EKP	Rasbin	Peringatan Sedunia
	PDN	Aryo Wasisto	Proyek Str
	HI	P. Partogi Nainggolan	Tingkat Pengangguran
	KS	Ujianto Singgih	Pasca Pilkada Serentak
Minggu ke 3 11 Desember s.d. 17 Desember	Hukum	Harris Y. P. Sibuea	Dampak Kebijakan PSBB terhadap Pariwisata
	EKP	Yuni Sudarwati	Tes Antigen
	PDN	Anin Dhita Kiky Amrynudin	Permasalahan SIREKAP dalam Pilkada
	HI	Humphrey Wangke	Hubungan Indonesia Israel
	KS	Sulis Winurini	Kebijakan Vaksin Covid-19 Gratis
Minggu ke 4 18 Desember s.d. 24 Desember	Hukum	Marfuatul Latifah	Penegakar Pelanggaran
	EKP	Mandala Harefa dan Rais Agil	Tantangan Penerimaan dan Defisit APBN
	PDN	Sidiq Budi Sejati	Antisipasi Bertambahnya Klaster Liburan Tahun Baru 2020
	HI	Ziyad Falahi	Kebijakan Keamanan China di Xinjiang
	KS	Dinar Wahyuni	Reshuffle Kabinet dan Kebijakan Bantuan Sosial

Sumber: Puslit, 2020.

Pusat Penelitian Badan Keahlian

Pusat Penelitian Badan Keahlian

Pusat Penelitian Badan Keahlian

Pusat Peneliti



**Tim Penyusun Laporan Kinerja  
Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2020**



**PUSAT PENELITIAN**

GEDUNG NUSANTARA 1, LANTAI 2  
JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA  
PUSAT 10270  
TELP.: +62-21-5715891